



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2023**

PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**



SALINAN

BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pasal 2

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2023 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2023.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2023.

BAB II

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2023 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2023 dan Renstra PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.
- (3) PD menyusun RKA Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Renja PD.

Pasal 6

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2023.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 4 Agustus 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 4 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022 NOMOR 40

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA


ERI FORTUNA, SH
NIP.19660104199303 1 006

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Awal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Awal merupakan penjabaran dari Pasal 140 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang telah diverifikasi dan disempurnakan untuk dicetak menjadi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Dalam penyusunannya Renja ini berpedoman kepada Perda RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, dalam sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Pada Akhirnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 masih belum sempurna, untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai sebagai pembelajaran (*Learning Process*) demi penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) dimasa yang akan datang.

Payakumbuh, Desember 2021

KEPALA DINASKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Ir. EKI HARTIPURNAMA, M.Si
Nip: 196608281998031002

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
BAB. I. PENDAHULUAN	1
BAB. II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	17
BAB. III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	55
BAB. IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	64
BAB. V. Penutup	67





DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kalender Penyusunan Renja.....	3
2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja.....	19
3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Prangkat Daerah	39
4. Pencapaian Indikator Kinerja Utama	41
5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	53
6. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan... ..	54
7. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja	58
8. Program dan kegiatan disetiap OPD	60
9. Program dan Kegiatan lingkup Urusan Komunikasi dan Informatika....	61
10. Program dan Kegiatan lingkup Urusan Statistik.....	62
11. Program dan Kegiatan lingkup Urusan Persandian	62
12. Identifikasi permasalahan.....	63
13. Rencana Program dan Kegiatan... ..	64
14. Rencana Target Kinerja	64
15. Rencana Target Kinerja Pelayanan	65
16. Rencana Kebutuhan Pendanaan berdasarkan urusan	66



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam melakukan penyusunan Renja PD Tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Dengan berpedoman pada pasal 16 ayat 2 Permendagri 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

- I. Persiapan Penyusunan;
- II. Penyusunan Rancangan Awal;
- III. Penyusunan Rancangan;
- IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- V. Perumusan Rancangan Akhir;
- VI. Penetapan.



Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1. Persiapan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika** dilaksanakan sebagai berikut:
 1. Penyusunan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota nomor 328 tahun 2021 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio yang dikeluarkan tanggal 27 November 2021. Disamping itu juga dikeluarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk detail penyusunannya.
 2. Mengadakan orientasi penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika yang melibatkan seluruh anggota tim penyusunan Renja pada akhir tahun 2021 tanggal Desember 2021 di Dinas Komunikasi dan Informatika. Orientasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar sesama anggota tim dalam hal tatacara, kaidah serta jadwal penyusunan penyusunan renja.
 3. Demi kelancaran dan pemenuhan ketepatan waktu penyusunan, maka disusun kalender Penyusunan Renja dengan berpedoman kepada SE Bupati Lima Puluh Kota Nomor 027/1/III/SE/BAPELITBANG-LK/2021 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023 serta menyesuaikan dengan perkembangan penyusunan RKPD Tahun 2023. Adapun jadwal disusun sebagai berikut:



No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2021					2022								
		Okt	Nop	Des	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli				
					I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV V				
3	Penyampaian rancangan awal renja yang memuat rumusan kegiatan dan /atau kegiatan baru dalam forum Perangkat Daerah /lintas PD														
C	Penyusunan Rancangan Renja														
1	Penyusunan Rancangan Renja														
2	Penyampaian Rancangan Renja kepada Bapelitbang untuk diverifikasi sebagai bahan penyempurnaan ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD														
3	Verifikasi Renja oleh Bapelitbang untuk menjamin bahwa rancangan renja Dinas Kominfo sudah selaras dengan rancangan awal RKPD														
4	Penyempurnaan Rancangan Renja dengan mempedomani hasil verifikasi														
5	Penyampaian kembali														



No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2021			2022																																		
		Okt	Nop	Des	Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli																
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	V						
	program, kegiatan dan pagu indikatif PD berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan di dalam perkara RKPD																																						
F	Penetapan Renja																																						
1	Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja ke Bapelitbang untuk diverifikasi yaitu menjamin program, kegiatan, dan pagu indikatif Renja PD selaras dengan Peraturan KD tentang RKPD dan Renja PD lainnya																																						
2	Penyempurnaan Rancangan akhir renja setelah diverifikasi																																						
3	Penyempurnaan kembali rancangan akhir renja yang telah disempurnakan berdasarkan hasil verifikasi ke Bapelitbang																																						

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2021			2022																					
		Okt	Nop	Des	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli									
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	V	
4	Penyampelan rancangan akhir renja semua OPD oleh Bapelitbang kepada KD melalui sekretaris daerah untuk selanjutnya ditetapkan dengan Perkada																									
5	Penetapan Draft Perkada renja menjadi Perkada Renja OPD se-Kabupaten Lima Puluh Kota																									

Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.



II. Penyusunan Rancangan Awal Renja

Pada awal bulan November 2021 mulai dilakukan penyusunan rancangan awal Renja Dinas Komunikasi dan Informatika oleh tim penyusun. Penyusunan berpedoman pada Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 - 2026 dan hasil evaluasi Renja tahun 2021.

Penyusunan rancangan awal Renja Dinas Komunikasi dan Informatika mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu;
- c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

III. Penyusunan Rancangan Renja

Penyusunan Rancangan Renja merupakan Rancangan Awal Renja yang disempurnakan mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika kemudian dibahas dan disempurnakan dalam Forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada 24 s/d 25 Maret 2022. Penyajian Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Awal Renja.

Pada minggu ketiga bulan Maret, Rancangan Renja yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Bapelitbang untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Berdasarkan hasil verifikasi dari tim di Bapelitbang, maka Rancangan Renja disempurnakan dan hasil penyempurnaannya disampaikan kembali ke Dinas Komunikasi dan Informatika.



IV. Pelaksanaan Forum Gabungan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil koordinasi OPD dan Bapelitbang, maka demi efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Forum OPD dilaksanakan secara gabungan pada Forum Gabungan Perangkat Daerah di Bapelitbang. Forum dilaksanakan selama 8 hari mulai tanggal 25 Februari s.d 6 Maret 2022 di Bapelitbang.

Forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang hadir pada forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.

V. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Awal Renja Dinas Komunikasi dan Informatika.

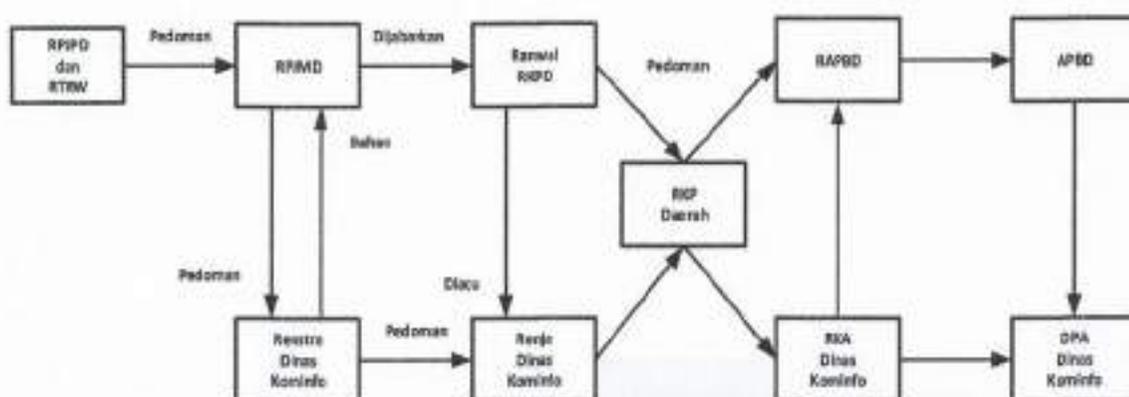
VI. Penetapan

Dalam hal penetapan Renja, Dinas Komunikasi dan Informatika mengumpulkan Rancangan Akhir Renja semua Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan selanjutnya dijadikan sebagai bahan penetapan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.



Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Renja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan Awal Renja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga harus mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/ Provinsi Sumatera Barat.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 mengacu pada penjabaran dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 - 2026, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota



sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam mendukung Misi ke 4 Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Meningkatkan Kualitas Layanan Publik melalui reformasi Birokrasi Seutuhnya.

Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman/ acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Berkaitan dengan itu, maka Renja PD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Selanjutnya Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2023 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 5887);
9. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 41/PERMEN KOMINFO/11/2003 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional..
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJP Daerah, RPJMD, serta tatacara perubahan RPJP Daerah dan RPJMD dan RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 110 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021. (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 110) ;
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 95);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika adalah untuk:

1. Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Komunikasi Dan Informatika secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2023 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Komunikasi Dan Informatika.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi Dan Informatika untuk tahun 2023.



Berkaitan dengan maksud di atas, Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Komunikasi Dan Informatika dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2023.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Komunikasi Dan Informatika.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi Dan Informatika pada tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, maksud, tujuan, landasan penyusunan dan sistematika penulisan.

II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Lalu

Berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dan sebagainya.

III. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika.

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023.

IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

V. Penutup

Berisi ketentuan penutup



1.5. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja (Renja)

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selain menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat juga menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan agar sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan dan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

1.6. Rencana Kerja (Renja) Propinsi Sumatera Barat.

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan Renja PD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program, kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.7. Tindak Lanjut dengan Proses Penyusunan RAPBD

UU No.25 tahun 2004 memperlihatkan keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran. Penganggaran yang tercermin pada RAPBN/RAPBD tersebut adalah hasil akhir dari dokumen perencanaan sebelumnya yang dikenal dengan Rencana



Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN/D), Rencana Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D), Rencana Kerja Pemerintah Nasional/Daerah (RKPN/RKPD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ini berarti bahwa perencanaan sangat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi pengalokasian anggaran untuk kepentingan masyarakat.

Perencanaan dilihat dari kerangka waktu terdiri dari perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJP) yang berdimensi 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) berdimensi 5 tahun dan rencana pembangunan jangka pendek atau perencanaan tahunan yang dalam hal ini rencana kerja pemerintah (RKP). Dilihat dari sisi kelembagaan, perencanaan ada yang bersifat menyeluruh yaitu perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan ada pula perencanaan yang dilakukan oleh sub organisasi pemerintah daerah yang disebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni rencana strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah. Sehingga Setelah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun akan menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Bulan Oktober 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Bulan oktober 2021 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2023 (tahun n-1) dengan mengacu kepada APBD tahun 2021 yang sudah disahkan pada waktu penyusunan Renja. Review ini dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Bulan oktober 2021 dan realisasi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika dan realisasi APBD. Dari hasil review yang dilakukan, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;

Berdasarkan 4 kondisi diatas, pada Bab ini nantinya akan dijelaskan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau apakah target kinerja program/ kegiatan melebihi dari yang direncanakan, serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika. Disamping itu juga akan dijelaskan kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.



Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Bulan oktober 2021 disajikan Tabel T-C.29. sebagai berikut:



Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode Rekening	Uraian/Detail Uraian Pelaksanaan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (Kategori) dan Kegiatan Output	Capaian Program (Persentase PD Tahun 2021) periode Perencanaan (T0)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2022	Pembinaan Pembahasan Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan 2019	
				Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan 2019
9	3 KABUPATEN DAH MORONGMARA	3	4	5	6	7	8	9	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
01.10.01.15.01	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Reparasi, penggantian, layanan informasi dan program pada tingkat "teknologi" informasi komunikasi (T0)	52	63%	62%	81%	94%	83	83
01.10.01.15.02	Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Lumalumpang rakitan dan instalasi transmisi pada:							
		- GPD	33	38	30	38	100%	30	300%
		- Koneksi	13	13	13	13	100%	13	300%
		- Pasokan	23	1	1	1	100%	14	72%
		- Magnet	79					0	0%
		- Fasilitas Umum	13	4	10	10	100%	14	100%
		- Barak Dupa	4					4	100%
		- Bandwidth internet area meliputi: GPD, POC, Praktisita, Rural dan Prapari	600 MB					800 MB	100%
		- Jasa Connection Server untuk IPSE	12 Bulan					12 Bulan	100%
		- Transmisi IP Transit	12 Bulan					12 Bulan	100%
		- Instalasi pengalihan server Manajemen User	0						
		- Upgrade dan jaringan komunikasi dan informasi GPD dan Ngiat	90%					90%	100%
		- LPTD	0,00					0	100%
01.10.01.15.03	Pencapaian dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	- Ajaran Utama Goodwill Kabupaten Lembing Pengembangan Pelayanan Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota	100	60 US peserta	50	50	100%	50	160
		- Jamban Peningkat Sosial/Rapel (ODP) dan Labortorium Kabupaten Lima Puluh Kota	300						35
		- Penyusunan ODP dan Daftar Informasi yang dibutuhkan	4 dokumen	2 dok					2 Dok
		- Terwujudnya sumber dan prestasi PPD	1 laptop, 1 unit kuisering dan 1 Blower Electric	1 Men PC, 1 LCD, 1 Unit Kuis Tunggal, 1 Lemari Asap Besar, 1 Lemari Asap Kecil					1 Men PC, 1 LCD, 1 Unit Kuis Tunggal, 1 Lemari Asap Besar, 1 Lemari Asap Kecil, 1 rebo-nangas PPD, 2 pengalihan
			3 Kait	1 Kait				1 Kait	100%
			1 Kait					1 Kait	100%
			12 bulan					12 bulan	100%
			1 Kait					1 Kait	100%
			1 Kait					1 Kait	100%
		Terwujudnya Moore PPD membantu Anapam. Pengembangan PPD Perbarut	1 Kait					1 Kait	100%



Kode Bimbingan	Uraian/Detail Urusan Pemerintahan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (Kategori) dan Kegiatan Output	Target Kinerja Capaian Program (Maksimal) Tahun 2020 (skor perolehan maksimal dengan tahun 2020) (OPD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2021		Target program dan kegiatan 2022	Pencapaian Realisasi Capaian Kinerja 2022 dan Tahun Berikutnya 2023
				Target Kinerja OPD	Realisasi Kinerja Tingkat Realisasi (%)		
02.10.01.15.01	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas dan Efisiensi (Agility e-Governance)	- Meningkatkan Peningkatan Mayor Plan E-Governance 1. Efektifitasnya Forum Group Discussion 2. Efektifitasnya aplikasi bagi operator 3. Efektifitasnya dokumen dan lain sebagainya. 4. Efektifitasnya perizinan special e-Governance 5. Efektifitasnya perubahan Policy E-Governance 6. Efektifitasnya perubahan Perizinan terdapat aplikasi bagi OPD 7. Efektifitasnya rapid analysis rencana atau SOP 8. Efektifitasnya inovasi rencana atau perancangan bisnis berbasis RPA 9. Efektifitasnya integrasi data pada aplikasi e-Over 10. Amdan (Amdan dan manajemen domain Smart City 11. Amdan (Amdan dan manajemen domain Smart City 12. Amdan (Amdan dan manajemen domain Smart City 13. Amdan (Amdan dan manajemen domain Smart City 14. Amdan (Amdan dan manajemen domain Smart City 15. Amdan (Amdan dan manajemen domain Smart City 16. Amdan (Amdan dan manajemen domain Smart City 17. Amdan (Amdan dan manajemen domain Smart City 18. Amdan (Amdan dan manajemen domain Smart City 19. Amdan (Amdan dan manajemen domain Smart City 20. Amdan (Amdan dan manajemen domain Smart City	5 Berperforasi	1 April 2021 100 %	1 April 2021 100 %	8 April 2022 100%	100%
02.10.01.15.02	Peningkatan Sistem Perencanaan Anggaran (Agility e-Governance)	- Meningkatkan kualitas dan efisiensi perencanaan anggaran 1. Efektifitasnya perencanaan anggaran 2. Efektifitasnya perencanaan anggaran 3. Efektifitasnya perencanaan anggaran 4. Efektifitasnya perencanaan anggaran 5. Efektifitasnya perencanaan anggaran 6. Efektifitasnya perencanaan anggaran 7. Efektifitasnya perencanaan anggaran 8. Efektifitasnya perencanaan anggaran 9. Efektifitasnya perencanaan anggaran 10. Efektifitasnya perencanaan anggaran 11. Efektifitasnya perencanaan anggaran 12. Efektifitasnya perencanaan anggaran 13. Efektifitasnya perencanaan anggaran 14. Efektifitasnya perencanaan anggaran 15. Efektifitasnya perencanaan anggaran 16. Efektifitasnya perencanaan anggaran 17. Efektifitasnya perencanaan anggaran 18. Efektifitasnya perencanaan anggaran 19. Efektifitasnya perencanaan anggaran 20. Efektifitasnya perencanaan anggaran	40 OPD	100 %	40 OPD 100%	40 OPD 100%	100%
02.10.01.15.03	Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi	- Meningkatkan kualitas dan efisiensi perencanaan anggaran 1. Efektifitasnya perencanaan anggaran 2. Efektifitasnya perencanaan anggaran 3. Efektifitasnya perencanaan anggaran 4. Efektifitasnya perencanaan anggaran 5. Efektifitasnya perencanaan anggaran 6. Efektifitasnya perencanaan anggaran 7. Efektifitasnya perencanaan anggaran 8. Efektifitasnya perencanaan anggaran 9. Efektifitasnya perencanaan anggaran 10. Efektifitasnya perencanaan anggaran 11. Efektifitasnya perencanaan anggaran 12. Efektifitasnya perencanaan anggaran 13. Efektifitasnya perencanaan anggaran 14. Efektifitasnya perencanaan anggaran 15. Efektifitasnya perencanaan anggaran 16. Efektifitasnya perencanaan anggaran 17. Efektifitasnya perencanaan anggaran 18. Efektifitasnya perencanaan anggaran 19. Efektifitasnya perencanaan anggaran 20. Efektifitasnya perencanaan anggaran	340 Paket Kerja	100 %	340 Paket Kerja 100%	340 Paket Kerja 100%	100%
02.10.01.15.12	Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi	- Meningkatkan kualitas dan efisiensi perencanaan anggaran 1. Efektifitasnya perencanaan anggaran 2. Efektifitasnya perencanaan anggaran 3. Efektifitasnya perencanaan anggaran 4. Efektifitasnya perencanaan anggaran 5. Efektifitasnya perencanaan anggaran 6. Efektifitasnya perencanaan anggaran 7. Efektifitasnya perencanaan anggaran 8. Efektifitasnya perencanaan anggaran 9. Efektifitasnya perencanaan anggaran 10. Efektifitasnya perencanaan anggaran 11. Efektifitasnya perencanaan anggaran 12. Efektifitasnya perencanaan anggaran 13. Efektifitasnya perencanaan anggaran 14. Efektifitasnya perencanaan anggaran 15. Efektifitasnya perencanaan anggaran 16. Efektifitasnya perencanaan anggaran 17. Efektifitasnya perencanaan anggaran 18. Efektifitasnya perencanaan anggaran 19. Efektifitasnya perencanaan anggaran 20. Efektifitasnya perencanaan anggaran	1 Paket	100 %	1 Paket 100%	1 Paket 100%	100%
02.10.01.15.13	Peningkatan Sistem Perencanaan Anggaran (Agility e-Governance)	- Meningkatkan kualitas dan efisiensi perencanaan anggaran 1. Efektifitasnya perencanaan anggaran 2. Efektifitasnya perencanaan anggaran 3. Efektifitasnya perencanaan anggaran 4. Efektifitasnya perencanaan anggaran 5. Efektifitasnya perencanaan anggaran 6. Efektifitasnya perencanaan anggaran 7. Efektifitasnya perencanaan anggaran 8. Efektifitasnya perencanaan anggaran 9. Efektifitasnya perencanaan anggaran 10. Efektifitasnya perencanaan anggaran 11. Efektifitasnya perencanaan anggaran 12. Efektifitasnya perencanaan anggaran 13. Efektifitasnya perencanaan anggaran 14. Efektifitasnya perencanaan anggaran 15. Efektifitasnya perencanaan anggaran 16. Efektifitasnya perencanaan anggaran 17. Efektifitasnya perencanaan anggaran 18. Efektifitasnya perencanaan anggaran 19. Efektifitasnya perencanaan anggaran 20. Efektifitasnya perencanaan anggaran	200 OPD	100 %	200 OPD 100%	200 OPD 100%	100%



Kode Rekening	Uraian/Detail Usulan Pemenuhan Dana dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Fisikal, Monev, Program (outcome) dan Kegiatan Output	Uraian Kegiatan	Realisasi Target Kinerja Fisikal Program dan Kegiatan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		Target erapan dan Kegiatan Realisasi PD tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja Fisikal dan Monev Program dan Kegiatan Tahun 2021
					Target Kinerja PD	Realisasi Kinerja PD		
			<ul style="list-style-type: none"> Terdapatnya pengadaan Firewall Terdapatnya pembelian mesin tag apparatus untuk pengamanan dan pengamanan sistem elektronik Pemerintah Daerah Terdapatnya pengadaan Underuptable Power Supply (UPS) kelas Data Center Terdapatnya pengadaan AC kelas Data Center Terdapatnya pengadaan Messagade Switch 	4 unit			2 unit	6 unit
			<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan perangkat daerah yang mencakup peralatan berbasis TK 	1 unit			1 unit	1 unit
02.03.01.06	Program Pengujian dan Evaluasi Sistem Komunikasi dan Informasi		<ul style="list-style-type: none"> Terdapatnya uji pemenuhan smart branding untuk smart city Kab. Lima Puluh Kota 	100 %	90	90	60 %	80 %
02.03.01.06.01	Program dan Kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi		<ul style="list-style-type: none"> Terdapatnya pemenuhan smart branding untuk smart city Kab. Lima Puluh Kota 	100 %	100	100	100 %	100 %
			<ul style="list-style-type: none"> Terdapatnya sosialisasi/pelatihan bagi personal berbasis Terdapatnya study in smart city (smart branding) Aplikasi Smart Branding Feasibility Smart Branding Sociallial Smart Branding Dibentuk SK Percepatan Mendorong dan Evaluasi Program Smart Branding 	1 Dokumen Review Smart Branding	4 unit	4 unit	4 unit	400 %
02.03.01.10.02	Pembinaan Gerakan Komunikasi Informatika dan Telekomunikasi		<ul style="list-style-type: none"> Terdapatnya Dokumen DED Jaringan TK. Kampanye Lima Puluh Kota dan satr data Kabupaten Lima Puluh Kota Dokumentasi Jaringan TK Kab. Lima Puluh Kota Terdapatnya pemenuhan Avaya Uno Terdapatnya PDU Branding dan dokumen TK Terdapatnya Pengadaan Server 1 (unit), data Terdapatnya pengembangan web data Kabupaten Lima Puluh Kota 	1 Dokumen Review Smart Branding	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
			<ul style="list-style-type: none"> Penelitian Gerakan Dhyas Menyusun materi belajar Informasi 	100 %	100	100	100 %	100 %
02.10.01.17	Program Fasilitas		<ul style="list-style-type: none"> Penelitian Gerakan Dhyas Menyusun materi belajar Informasi 	100 %	100	100	100 %	100 %
02.10.01.17.01	Program Fasilitas		<ul style="list-style-type: none"> Penelitian Gerakan Dhyas Menyusun materi belajar Informasi 	100 %	100	100	100 %	100 %



Node Rekening	Uraian/Detail Uraian Penerimaan Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Output), Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan Output	Target Kinerja Sasaran Program (RPJMD Tahun 2023)	Realisasi Target Kinerja Sasaran Program (RPJMD Tahun 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023		Target program dan kegiatan RPJMD tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023	
					Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program			
02.03.01.17.02	Penyediaan dan pemeliharaan sarana transportasi umum (SLTP B, TA)	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya SLTP dan SLTA dalam bidang angkutan Penyediaan dan pemeliharaan sarana SLTA dan SLK 	28 orang peserta	28 orang peserta			28 orang peserta	100%	
02.03.01.17.03	Pengadaan sarana/transportasi umum (Kendaraan Umum)	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya sarana yang layak dan aman Terlaksananya Pemeliharaan Aset dan Mobil Penyediaan dan pemeliharaan kapal antar B, TA 	40 orang peserta	40 orang peserta			25 orang	62,5%	
02.03.01.17.03	Pengadaan sarana/transportasi umum (Kendaraan Umum)	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya sarana yang layak dan aman Terlaksananya Pemeliharaan Aset dan Mobil Penyediaan dan pemeliharaan kapal antar B, TA 	80 peserta	80 peserta			1 kali	60 peserta	75%
02.03.01.18.01	Program Kegiatan Informasi dan Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan pemeliharaan sarana transportasi umum (Kendaraan Umum) Terlaksananya sarana yang layak dan aman Terlaksananya Pemeliharaan Aset dan Mobil Penyediaan dan pemeliharaan kapal antar B, TA 	1 Kali Pelatihan	1 Kali Pelatihan			1 Kali Pelatihan	2 Kali Pelatihan	200%
02.03.01.18.01	Program Kegiatan Informasi dan Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan pemeliharaan sarana transportasi umum (Kendaraan Umum) Terlaksananya sarana yang layak dan aman Terlaksananya Pemeliharaan Aset dan Mobil Penyediaan dan pemeliharaan kapal antar B, TA 	83 %	83 %	83 %	100%	48 %		
02.03.01.18.01	Program Kegiatan Informasi dan Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan pemeliharaan sarana transportasi umum (Kendaraan Umum) Terlaksananya sarana yang layak dan aman Terlaksananya Pemeliharaan Aset dan Mobil Penyediaan dan pemeliharaan kapal antar B, TA 	3 Sub Reporting	3 Sub Reporting					
02.03.01.18.01	Program Kegiatan Informasi dan Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan pemeliharaan sarana transportasi umum (Kendaraan Umum) Terlaksananya sarana yang layak dan aman Terlaksananya Pemeliharaan Aset dan Mobil Penyediaan dan pemeliharaan kapal antar B, TA 	4 kali Pelatihan	4 kali Pelatihan			1 kali	3 kali pelatihan	75%
02.03.01.18.01	Program Kegiatan Informasi dan Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan pemeliharaan sarana transportasi umum (Kendaraan Umum) Terlaksananya sarana yang layak dan aman Terlaksananya Pemeliharaan Aset dan Mobil Penyediaan dan pemeliharaan kapal antar B, TA 	1 Aplikasi	1 Aplikasi				1 aplikasi	100%
02.03.01.18.01	Program Kegiatan Informasi dan Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan pemeliharaan sarana transportasi umum (Kendaraan Umum) Terlaksananya sarana yang layak dan aman Terlaksananya Pemeliharaan Aset dan Mobil Penyediaan dan pemeliharaan kapal antar B, TA 	1 laporan	1 laporan			1 laporan	4 Sublaman	100%
02.03.01.18.01	Program Kegiatan Informasi dan Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan pemeliharaan sarana transportasi umum (Kendaraan Umum) Terlaksananya sarana yang layak dan aman Terlaksananya Pemeliharaan Aset dan Mobil Penyediaan dan pemeliharaan kapal antar B, TA 	55 Sublaman	55 Sublaman			52 Sublaman	93 Sublaman	80%
02.03.01.18.01	Program Kegiatan Informasi dan Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan pemeliharaan sarana transportasi umum (Kendaraan Umum) Terlaksananya sarana yang layak dan aman Terlaksananya Pemeliharaan Aset dan Mobil Penyediaan dan pemeliharaan kapal antar B, TA 	100 buku Buku Saku	100 buku Buku Saku			100 buku Buku Saku	100 buku Buku Saku	100%
02.03.01.18.01	Program Kegiatan Informasi dan Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan pemeliharaan sarana transportasi umum (Kendaraan Umum) Terlaksananya sarana yang layak dan aman Terlaksananya Pemeliharaan Aset dan Mobil Penyediaan dan pemeliharaan kapal antar B, TA 	2 kali	2 kali			1 kali	2 kali	100%
02.03.01.18.01	Program Kegiatan Informasi dan Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan pemeliharaan sarana transportasi umum (Kendaraan Umum) Terlaksananya sarana yang layak dan aman Terlaksananya Pemeliharaan Aset dan Mobil Penyediaan dan pemeliharaan kapal antar B, TA 	1 kali Screentime	1 kali Screentime			1 kali	1 kali	100%
02.03.01.18.01	Program Kegiatan Informasi dan Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan pemeliharaan sarana transportasi umum (Kendaraan Umum) Terlaksananya sarana yang layak dan aman Terlaksananya Pemeliharaan Aset dan Mobil Penyediaan dan pemeliharaan kapal antar B, TA 	2 news konten	2 news konten			2 news konten	2 news konten	100%
02.03.01.18.01	Program Kegiatan Informasi dan Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan pemeliharaan sarana transportasi umum (Kendaraan Umum) Terlaksananya sarana yang layak dan aman Terlaksananya Pemeliharaan Aset dan Mobil Penyediaan dan pemeliharaan kapal antar B, TA 	70 Durasi Mager	70 Durasi Mager			70 Durasi Mager	70 Durasi Mager	100%
02.03.01.18.01	Program Kegiatan Informasi dan Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan pemeliharaan sarana transportasi umum (Kendaraan Umum) Terlaksananya sarana yang layak dan aman Terlaksananya Pemeliharaan Aset dan Mobil Penyediaan dan pemeliharaan kapal antar B, TA 	1 Durasi	1 Durasi			1 Durasi	1 Durasi	100%
02.03.01.18.01	Program Kegiatan Informasi dan Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan pemeliharaan sarana transportasi umum (Kendaraan Umum) Terlaksananya sarana yang layak dan aman Terlaksananya Pemeliharaan Aset dan Mobil Penyediaan dan pemeliharaan kapal antar B, TA 	5 sub domain	5 sub domain			10 sub domain	15 sub domain	200%
02.03.01.18.01	Program Kegiatan Informasi dan Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan pemeliharaan sarana transportasi umum (Kendaraan Umum) Terlaksananya sarana yang layak dan aman Terlaksananya Pemeliharaan Aset dan Mobil Penyediaan dan pemeliharaan kapal antar B, TA 	3 (tiga) kali Festival Film	3 (tiga) kali Festival Film			1 (satu) kali Festival Film	1 (satu) kali Festival Film	20%
02.03.01.18.01	Program Kegiatan Informasi dan Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan pemeliharaan sarana transportasi umum (Kendaraan Umum) Terlaksananya sarana yang layak dan aman Terlaksananya Pemeliharaan Aset dan Mobil Penyediaan dan pemeliharaan kapal antar B, TA 	5 (lima) kali Lomba Foto	5 (lima) kali Lomba Foto			1 (satu) kali Lomba Foto	1 (satu) kali Lomba Foto	20%
02.03.01.18.01	Program Kegiatan Informasi dan Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan pemeliharaan sarana transportasi umum (Kendaraan Umum) Terlaksananya sarana yang layak dan aman Terlaksananya Pemeliharaan Aset dan Mobil Penyediaan dan pemeliharaan kapal antar B, TA 	5 (lima) kali Lomba Mading	5 (lima) kali Lomba Mading			1 (satu) kali Lomba Mading	1 (satu) kali Lomba Mading	20%
02.03.01.18.01	Program Kegiatan Informasi dan Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan pemeliharaan sarana transportasi umum (Kendaraan Umum) Terlaksananya sarana yang layak dan aman Terlaksananya Pemeliharaan Aset dan Mobil Penyediaan dan pemeliharaan kapal antar B, TA 	5 kali lomba media tradisional	5 kali lomba media tradisional			1 kali lomba media tradisional	1 kali lomba media tradisional	20%
02.03.01.18.01	Program Kegiatan Informasi dan Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan pemeliharaan sarana transportasi umum (Kendaraan Umum) Terlaksananya sarana yang layak dan aman Terlaksananya Pemeliharaan Aset dan Mobil Penyediaan dan pemeliharaan kapal antar B, TA 	28 orang	28 orang					
02.03.01.18.01	Program Kegiatan Informasi dan Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan pemeliharaan sarana transportasi umum (Kendaraan Umum) Terlaksananya sarana yang layak dan aman Terlaksananya Pemeliharaan Aset dan Mobil Penyediaan dan pemeliharaan kapal antar B, TA 	2 Sublaporan (-16 orang)	2 Sublaporan (-16 orang)					
02.03.01.18.01	Program Kegiatan Informasi dan Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan pemeliharaan sarana transportasi umum (Kendaraan Umum) Terlaksananya sarana yang layak dan aman Terlaksananya Pemeliharaan Aset dan Mobil Penyediaan dan pemeliharaan kapal antar B, TA 	3 kali Reporting	3 kali Reporting					



Kode Rekening	Uraian/Objek Unsur Pembiayaan Dalam dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Fisikal, Sistem, Program (outcome) dan Kegiatan Output	Tipe/Program Kegiatan (Rincian IPD selain apa saja untuk periode tertentu dan/atau jenis kegiatan)	Target dan Realisasi Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Rincian/Detail Kegiatan 2023	Pencapaian Realisasi Capaian Target Realisasi IPD 2023
				Target Realisasi IPD	Realisasi Bekerja	Target Realisasi (%)		
02.53.01.18.00	Peningkatan aksesibilitas layanan publik melalui digitalisasi	- Peningkatan aksesibilitas layanan publik	1 kali inovasi					
		- Layanan berbasis digital	1 kali inovasi					
		- Tindakan nyata untuk peningkatan aksesibilitas layanan publik	1 kali			1 kali		100%
		- Meningkatkan media tradisional	3 kali			3 kali		100%
02.53.01.18.01	Peningkatan aksesibilitas layanan publik melalui digitalisasi	- Koordinasi media tradisional ke Kabupaten Provisi	3 kali					
		- Tindakan nyata untuk peningkatan aksesibilitas layanan publik	4 kali			4 kali		100%
		- Jumlah penyediaan informasi kepada masyarakat berupa berita	50 Berita	25 Berita	100%	1 media	75 Berita, 1 media	82%
		- Jumlah penyediaan informasi kepada masyarakat berupa layanan	12 Spanduk	24 Spanduk	100%	1 media	67 Spanduk	86%
02.18.01.18.07	Peningkatan aksesibilitas layanan publik melalui digitalisasi	- Jumlah penyediaan informasi kepada masyarakat berupa layanan	17 Layanan					
		- Jumlah penyediaan informasi kepada masyarakat berupa layanan	48 Layanan			1 media	16 layanan, 1 media	40%
		- Jumlah penyediaan informasi kepada masyarakat berupa Layanan	12 PUS Lupa			1 media	1 media	
		- Jumlah penyediaan informasi kepada masyarakat berupa Layanan	1000 Layanan			1 media	1 media	
02.18.01.18.08	Peningkatan aksesibilitas layanan publik melalui digitalisasi	- Jumlah penyediaan informasi kepada masyarakat berupa Layanan	3 Video 1 Film					
		- Jumlah penyediaan informasi kepada masyarakat berupa Layanan	4 Film	1 Film	50%	1 media	1 media	
		- Jumlah penyediaan informasi kepada masyarakat berupa Layanan	2 Film	1 Film	50%	1 media	1 media	
		- Jumlah penyediaan informasi kepada masyarakat berupa Layanan	17 Film			17 Film		100%
02.18.01.18.09	Peningkatan aksesibilitas layanan publik melalui digitalisasi	- Jumlah penyediaan informasi kepada masyarakat berupa Layanan	51 Peserta, 17 KM					
		- Jumlah penyediaan informasi kepada masyarakat berupa Layanan	34 kali					
		- Jumlah penyediaan informasi kepada masyarakat berupa Layanan	1 kali				1 kali	100%
		- Jumlah penyediaan informasi kepada masyarakat berupa Layanan	104 Tindakan	50 kali tindakan	50%	1 media	70 Tindakan	75%
	Peningkatan aksesibilitas layanan publik melalui digitalisasi	- Tindakan nyata untuk peningkatan aksesibilitas layanan publik	1 kali					
		- Tindakan nyata untuk peningkatan aksesibilitas layanan publik	3 kali berita lama berita baru				1 kali berita lama berita baru	33%
		- Tindakan nyata untuk peningkatan aksesibilitas layanan publik	4 Unit Perangkat				4 Unit Perangkat	100%
		- Tindakan nyata untuk peningkatan aksesibilitas layanan publik						

No	Materi	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sekoran, Program (Outcome) dan Kegiatan Output	Kategori Kegiatan	Maksimal Target Kinerja (Batas Atas) Program dan Kegiatan Output	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023		Target program dan kegiatan Revisi RPJMD tahun 2023	Pencapaian Realisasi Capaian Target Kinerja (K) dan Target Output (O) tahun 2023
						Target Kinerja PO	Realisasi Kinerja PO		
			1. Terselenggaranya urusan pemerintahan statistik	3 Laptop, 3 Printer, 1 PC, 1 Printer, 2 Laptop, 2 Printer	1 Printer, 1 Inkjet, 1 Inkjet, 1 Inkjet, 1 Inkjet, 1 Inkjet	100%	100%	100%	100%
			• Goodwill E database dan pengumpulan data statistik sektoral	100 Peserta	100 Peserta			100%	100%
			• Hasil Utama Keluaran Kerja (HUKK) Kota	1 Paket	1 Paket			100%	100%
			• PDRH					1 Paket	100%
02.18.01.01	PERGANTIAN Program Peningkatan dan penguatan kapasitas		Target Keamanan Informasi Perencanaan Daerah	90 %	88%	88%	88%	25.00%	88%
02.18.01.01.01	Pengembangan sumber daya manusia		- Peningkatan Perilaku (PDRH) dan (PDRH) dan (PDRH)	100 Peserta	100 Peserta	100%	100%	100%	100%
			- Jaring Perantara komunikasi dan informasi	400 peserta	400 Peserta	100%	100%	100%	100%
			- Jumlah peserta pelatihan kompetensi teknis	4 orang	4 orang			4 orang	100%
			- Jumlah peserta pelatihan kompetensi manajerial	1 orang	1 orang			2 orang	200%
02.18.01.01.02	Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Perencanaan		- Jumlah peserta pelatihan yang terakumulasi	1 paket	1 paket	100%	100%	1 paket	100%
			- Jumlah peserta pelatihan yang terakumulasi	3 Kegiatan Keluaran	3 Kegiatan Keluaran			3 Kegiatan Keluaran	100%
02.18.01.01.03	Meningkatkan dan penguatan kapasitas penyelenggaraan Perencanaan		Uji coba Perencanaan dan penguatan kapasitas penyelenggaraan Perencanaan	3 Laporan	1 Laporan	100%	100%	1 Laporan	100%
02.18.01.01.04	Program Peningkatan dan penguatan kapasitas penyelenggaraan Perencanaan		Peningkatan Perencanaan dan penguatan kapasitas penyelenggaraan Perencanaan	90 %	90%	100%	100%	29 %	100%
02.18.01.01.01	Kegiatan Peningkatan dan penguatan kapasitas penyelenggaraan Perencanaan		Terselenggaranya administrasi jasa surat menyurat	60 bulan	12 bulan	100%	100%	12 bulan	100%
02.18.01.01.02	Kegiatan Peningkatan dan penguatan kapasitas penyelenggaraan Perencanaan		Terselenggaranya administrasi jasa surat menyurat	60 bulan	12 bulan	100%	100%	12 bulan	100%
02.18.01.01.03	Kegiatan Peningkatan dan penguatan kapasitas penyelenggaraan Perencanaan		Terselenggaranya administrasi jasa surat menyurat	60 bulan	12 bulan	100%	100%	12 bulan	100%
02.18.01.01.04	Kegiatan Peningkatan dan penguatan kapasitas penyelenggaraan Perencanaan		Terselenggaranya administrasi jasa surat menyurat	60 bulan	12 bulan	100%	100%	12 bulan	100%
02.18.01.01.05	Kegiatan Peningkatan dan penguatan kapasitas penyelenggaraan Perencanaan		Terselenggaranya administrasi jasa surat menyurat	60 bulan	12 bulan	100%	100%	12 bulan	100%
02.18.01.01.06	Kegiatan Peningkatan dan penguatan kapasitas penyelenggaraan Perencanaan		Terselenggaranya administrasi jasa surat menyurat	60 bulan	12 bulan	100%	100%	12 bulan	100%
02.18.01.01.07	Kegiatan Peningkatan dan penguatan kapasitas penyelenggaraan Perencanaan		Terselenggaranya administrasi jasa surat menyurat	60 bulan	12 bulan	100%	100%	12 bulan	100%
02.18.01.01.08	Kegiatan Peningkatan dan penguatan kapasitas penyelenggaraan Perencanaan		Terselenggaranya administrasi jasa surat menyurat	60 bulan	12 bulan	100%	100%	12 bulan	100%
02.18.01.01.09	Kegiatan Peningkatan dan penguatan kapasitas penyelenggaraan Perencanaan		Terselenggaranya administrasi jasa surat menyurat	60 bulan	12 bulan	100%	100%	12 bulan	100%
02.18.01.01.10	Kegiatan Peningkatan dan penguatan kapasitas penyelenggaraan Perencanaan		Terselenggaranya administrasi jasa surat menyurat	60 bulan	12 bulan	100%	100%	12 bulan	100%
02.18.01.01.11	Kegiatan Peningkatan dan penguatan kapasitas penyelenggaraan Perencanaan		Terselenggaranya administrasi jasa surat menyurat	60 bulan	12 bulan	100%	100%	12 bulan	100%

Kode Bekerja	Uraian/Detail Usulan Pemenuhan Tujuan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja/Target, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Output	Tetapan Anggaran (Rp)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan seluruh kegiatan di dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		Tetapan program dan kegiatan Berkas PDB tahun 2021	Pributan Realisasi Output Output Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan "Kategori" (RKA)
					Target Rangka PD	Realisasi Rangka PD		
1.02.01.01.01.12	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan (Kategori) dan Penyelenggaraan Kegiatan	Jumlah pelaksanaan pelaksanaan kegiatan (kategori) dan penyelenggaraan kegiatan	80 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	48 Bulan	80%
1.02.01.01.01.13	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan (Kategori) dan Penyelenggaraan Kegiatan	Jumlah pelaksanaan pelaksanaan kegiatan (kategori) dan penyelenggaraan kegiatan	80 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	48 Bulan	80%
1.02.01.01.01.14	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan (Kategori) dan Penyelenggaraan Kegiatan	Jumlah pelaksanaan pelaksanaan kegiatan (kategori) dan penyelenggaraan kegiatan	80 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	48 Bulan	80%
1.02.01.01.01.15	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan (Kategori) dan Penyelenggaraan Kegiatan	Jumlah pelaksanaan pelaksanaan kegiatan (kategori) dan penyelenggaraan kegiatan	80 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	48 Bulan	80%
1.02.01.01.01.17	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan (Kategori) dan Penyelenggaraan Kegiatan	Jumlah pelaksanaan pelaksanaan kegiatan (kategori) dan penyelenggaraan kegiatan	80 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	48 Bulan	80%
1.02.01.01.01.18	Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan (Kategori) dan Penyelenggaraan Kegiatan	Jumlah pelaksanaan pelaksanaan kegiatan (kategori) dan penyelenggaraan kegiatan	80 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	48 Bulan	80%
1.02.13.01.01	Program Penyelenggaraan Kegiatan dan Penyelenggaraan Kegiatan	Pemenuhan Penyelenggaraan Kegiatan dan Penyelenggaraan Kegiatan	80 %	70	80	80	80 %	80%
1.02.13.01.02.01	Pengadaan dan Penyelenggaraan Kegiatan	Jumlah pelaksanaan pelaksanaan kegiatan (kategori) dan penyelenggaraan kegiatan	3.000 unit (kategori) dan penyelenggaraan kegiatan					
02.10.01.02.01	Pengadaan dan Penyelenggaraan Kegiatan	Jumlah pelaksanaan pelaksanaan kegiatan (kategori) dan penyelenggaraan kegiatan						100%

Kode Rekening	Uraian/Bidang Uraian Pemeliharaan Garam dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja/Target, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Output	Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Rencana PO Mayor 2023	Pencapaian Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Target Tahun 2023	Pencapaian Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Target Tahun 2023
1.02.00.01.02.1E	Program Motor	Terwujudnya indikator performansi				60%
1.02.10.01.02.22	Pemeliharaan Rutin berkala (SOP) Motor	Jumlah Perawatan Gakwal/Pengawat/Gakwal SOP 3000	2 Paket	1 Paket tercapai	2 Paket	60%
1.02.10.01.02.26	Pemeliharaan Rutin berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dioperasikan siap pakai	2 unit kendaraan roda 4 (tempat), 2 unit kendaraan roda 2 (dua)	3 unit kendaraan roda 4 (tempat), 1 unit kendaraan roda 2 (dua)	3 unit kendaraan roda 4 (tempat), 2 unit kendaraan roda 2 (dua)	80%
1.02.10.01.02.40	Rehabilitasi kendaraan/ganti bagian motor		1 Paket	-	1 Paket	
1.02.10.01.02	Program Pemeliharaan Gakwal Aparatur	Pemeliharaan Revisi/overhaul dan Ganti/overhaul kendaraan operasional yang berlaku				
1.02.10.01.02.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas (selanjutnya) yang tersedia	50 (Seragam Lengkap Pak 1) pasang pakaian dinas		50 (Laras Putih Lurus) pasang pakaian dinas	20%
1.02.10.01.08	Pemeliharaan Kapasitor Stuktur Daya Aparatur	Pemeliharaan pemeliharaan dan kalibrasi aparat yang Miringkat	30 orang	0	0 orang peserta	14%
1.02.10.01.08	Kurungan Teknik Inspeksi/Perawatan Pemakaian perlengkapan elektronik	Jumlah teknik aparat guna peningkatan kualitas sumber daya aparat	30 orang	0	0 orang peserta	14%
1.02.10.01.06	Pemeliharaan Pengembangan Sistem Manajemen Capaian Kinerja dan Peringatan	Pemeliharaan pengembangan pengembangan Sistem Manajemen Capaian Kinerja dan Peringatan	74	90	90	100%
1.02.10.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Substansi Kinerja (SOP)	Jumlah laporan laporan kinerja (SOP) Motor kinerja kinerja BAPD yang legal valid	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.02.10.01.06.03	Penyusunan Laporan Keuangan Akor Tahun	Jumlah dokumen keuangan akor tahun yang selesai legal valid	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
1.18.01.2.02.01	Pengadaan gas dan turbin gas	Pemeliharaan (SOP) Garam	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Jumlah					300%



Berdasarkan tabel T-C.29 di atas, evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi renja sampai dengan Bulan oktober 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Program dan kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan untuk sampai dengan Bulan oktober 2021 tidak ada Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target, semua kegiatan dan program bisa memenuhi target yang di rencanakan.

II. Program dan kegiatan yang **telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain:

III. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan,

A. Alokasi dan Realisasi Dana serta Keluaran dan Hasil Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut

I Program penunjang urusan pemerintahan daerah

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD didanai melalui dana APBD dengan alokasi dana sebesar Rp 4.151.000,- sampai dengan bulan oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.155.000,- (77,20 %) dengan realisasi fisik sebesar 77,20 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Tersusunnya laporan capaian kinerja (LAKIP, Penetapan Kinerja, LKjIP, LPPD, RKA, DPA, Renja, DPA Perubahan dan RKA 2021 dengan capaian Kinerja berupa Tersedianya Laporan capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN didanai melalui dana APBD dengan alokasi dana sebesar Rp 3.066.921.305,- sampai dengan bulan oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.317.011.688,- (71,21 %) dengan realisasi fisik sebesar 71,21 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN selama 1 Tahun dengan capaian Kinerja Tersedianya Pembayaranan Gaji ASN Dinas Komunikasi dan Informatika.

2. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD didanai melalui dana APBD dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.913.000,- sampai dengan bulan oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.913.000,- dengan realisasi keuangan sebesar (100 %) dengan realisasi fisik sebesar 100 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Tersusunnya laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan capaian Kinerja berupa Tersedianya laporan keuangan secara akurat dan akuntabel.

C Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp 2.957.000,- sampai dengan bulan oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.957.000,- (100,00 %) dengan realisasi fisik sebesar 100,00 %, keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya alat alat listrik di Dinas Komunikasi dan Informatika dengan capaian Kinerja berupa lancarnya kegiatan operasional kantor seluruh kegiatan dinas kominfo.
2. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 73.400.000,- sampai dengan bulan oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 (0%) dengan realisasi fisik sebesar 0 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, dengan capaian Kinerja berupa Lancarnya kegiatan operasional kantor.
3. Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.000.000,- sampai dengan bulan oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 (0%) dengan realisasi fisik sebesar 0 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, dengan capaian Kinerja berupa Lancarnya kegiatan operasional kantor.
4. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 34.255.100,- sampai dengan bulan nopember 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.725.000,- (63,87 %) dengan realisasi fisik sebesar 63,87 % keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya alat tulis kantor dan Tersedianya Makan Minum Rapat dengan capaian Kinerja berupa lancarnya kegiatan operasional kantor

5. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 35.534.034,- sampai dengan bulan oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.363.800,- (57,72%) dengan realisasi fisik sebesar 57,72 % keluaran dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor, dengan capaian Kinerja berupa Lancarnya kegiatan Operasional kantor.
6. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturang Perundang – undangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.034.000,- sampai dengan bulan oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.700.000,- (45,05 %) dengan realisasi fisik sebesar 45,05 % keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, dengan capaian Kinerja berupa meningkatnya wawasan aparatur
7. Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.475.000,- sampai dengan bulan oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.900.000,- (76,77 %) dengan realisasi fisik sebesar 76,77 % keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat-rapat koordinasi dan tamu dengan capaian Kinerja berupa terlaksananya rapat-rapat dan terlayannya tamu kantor.
8. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 62.493.000,00 sampai dengan bulan oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 47.070.800 (68,85 %) dengan realisasi fisik sebesar 68,85 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi dengan berbagai instansi/pihak terkait dengan capaian Kinerja berupa terciptanya sinergi antar berbagai instansi.

D. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi dana sebesar Rp. 920.000,- sampai dengan bulan oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.641.000,- (25,19%) dengan realisasi fisik sebesar 25,19 % keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya Surat Menyurat Dinas Komunikasi dan Informatika dengan capaian Kinerja berupa lancarnya kegiatan operasional kantor.

2. Subkegiatan Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi dana sebesar Rp. 140.868.000,- sampai dengan bulan oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.59.706644,- (36,16%) dengan realisasi fisik sebesar 36,16 % keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya Penyediaan Pembayaran untuk Air, Listrik dan Telepon dengan capaian Kinerja berupa lancarnya kegiatan operasional kantor
3. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 305.636.120,- sampai dengan bulan oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.218.085.282,- (67,16 %) dengan realisasi fisik sebesar 67,16% keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pembayaran THL Bulanan, PTT, Penjaga Kantor dan tersedianya alat kebersihan dengan capaian Kinerja berupa lancarnya kegiatan operasional kantor.

E Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 143.137.808,- sampai dengan bulan oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 72.346.055,- (57,53 %) dengan realisasi fisik sebesar 57,53 % keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya biaya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional dengan capaian Kinerja berupa lancarnya kegiatan operasional kantor seluruh kegiatan dinas kominfo.
2. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp. 12.660.000,- sampai dengan bulan oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.475.000 (40,51 %) dengan realisasi fisik sebesar 40,51 %, keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya servis/ perbaikan peralatan kerja dengan capaian Kinerja berupa berfungsinya dengan baik peralatan kerja.

II Program Informasi dan Komunikasi Publik

A. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

1. Subkegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dengan alokasi dana sebesar Rp. 105.960.000,- sampai dengan bulan oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 40.275.000,- (36,99 %) dengan realisasi fisik sebesar 36,70 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah penyampaian informasi kepada masyarakat yang dilaksanakan berupa 5 Media penyampaian dengan capaian Kinerja berupa Jumlah Penyebarluasan informasi publik melalui media luar ruang (spanduk, baliho, billboard)
2. Subkegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan alokasi dana sebesar Rp. 362.351.000,- sampai dengan bulan oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 208.562.000,- (56,75 %) dengan realisasi fisik sebesar 56,75 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah penyampaian informasi kepada masyarakat yang dilaksanakan berupa 5 Media penyampaian dengan capaian Kinerja berupa Jumlah Penyebarluasan informasi publik melalui media luar ruang (spanduk, baliho, billboard)
3. Subkegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan alokasi dana sebesar Rp. 44.770.708,- sampai dengan bulan oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 25.132.922,- (51,76 %) dengan realisasi fisik sebesar 25,03 %, keluaran dari kegiatan ini Konsultasi tentang daftar informasi yang dikecualikan sebanyak 1 kali, Tersedianya Sarana dan Prasarana PPID berupa 1 Unit capaian Kinerja berupa Persentase peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Subkegiatan Layanan Hubungan Media dengan alokasi dana sebesar Rp. 485.796.924,- sampai dengan bulan oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 234.228.826,- (47,43 %) dengan realisasi fisik sebesar 14,23 %, keluaran dari kegiatan ini Jumlah Penyebarluasan informasi melalui Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) sebanyak 1 kali, Jumlah Kegiatan Peliputan Kepala Daerah di Lapangan sebanyak 365 kali dengan capaian Kinerja berupa Persentase peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Subkegiatan Manajemen Komunikasi Krisis dengan alokasi dana sebesar Rp. 654.049.000,- sampai dengan bulan oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 126.004.000,- (19,03 %) dengan realisasi fisik sebesar 19,03 %, keluaran dari kegiatan ini Penyelapan penanganan krisis sebanyak 12 bulan, Mengelola komunikasi krisis sebanyak 12 Bulan dan Mengevaluasi penanganan komunikasi krisis selama 13 Bulan dengan capaian Kinerja berupa Persentase peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

III Program Aplikasi dan Informatika

- A Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
 1. Subkegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 46.683.808,- sampai dengan bulan oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 30.055.000,- (36,47%) dengan realisasi fisik sebesar 25,55 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Terpelihara domain resmi limapuluhkotakab.go.id sebanyak 1 domain dan Terkelolanya domain openSID/pemeliharaan sebanyak 25 domain desa dengan capaian Kinerja berupa Persentase peningkatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
 2. Subkegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.659.497.400,- sampai dengan bulan oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.759.358.400,- (68,89 %) dengan realisasi fisik sebesar 68,89%, keluaran dari subkegiatan ini adalah Terpeliharanya Jumlah Jaringan Intra Pemerintah yang terkoneksi pada: OPD, Kecamatan, UPTD, Puskesmas, Rumah Dinas Pimpinan dan Nagari sebanyak 63 Paket dan Jaringan intra pemerintah milik Pemda sebanyak 1 Paket dengan capaian Kinerja berupa Persentase peningkatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.



B Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Subkegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 25.822.000,- sampai dengan bulan oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.690.400,- (34,00%) dengan realisasi fisik sebesar 34,00 %, keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya evaluasi SPBE Tahun 2021 sebanyak 1 kali dengan capaian Kinerja Persentase Peningkatan Pengelolaan e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Subkegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 136.888.872,- sampai dengan bulan oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 40.014.320,- (31,18%) dengan realisasi fisik sebesar 31,18%, keluaran dari kegiatan ini Jumlah pemeliharaan sarana prasarana perangkat pendukung infrastruktur Data Center yang memadai untuk 7 perangkat dengan capaian Kinerja Persentase Peningkatan Pengelolaan e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi dengan alokasi dana sebesar sebesar Rp. 111.010.920,- sampai dengan bulan oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 4.650.000,- (4,72 %) dengan realisasi fisik sebesar 4,72%, keluaran dari kegiatan ini Jumlah Pelaksanaan pengamanan terhadap sistem elektronik Pemerintah Daerah selama 12 Bulan dengan capaian Kinerja Persentase Peningkatan Pengelolaan e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik dengan alokasi dana sebesar Rp. 27.968.007 sampai dengan bulan oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 6.600.000,- (17,35%) dengan realisasi fisik sebesar 17,35%, keluaran dari kegiatan ini Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Satu Data Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 1 paket dengan capaian Kinerja Persentase Peningkatan Pengelolaan e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Subkegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dana sebesar Rp. 140.570.000,- sampai dengan bulan

oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 63.010.000,- (44,82%) dengan realisasi fisik sebesar 44,82%, keluaran dari kegiatan ini Jumlah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan sebanyak 2 aplikasi dan Jumlah pelaksanaan pelatihan bagi aparatur sebanyak 2 kali dengan capaian Kinerja Persentase Peningkatan Pengelolaan e-Government dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

6. Subkegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan dengan alokasi dana sebesar Rp. 24.669.000,- sampai dengan bulan oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2.066.000,- (8,13 %) dengan realisasi fisik sebesar 8,13 %, keluaran dari kegiatan ini Jumlah Integrasi data pada aplikasi e-Gov sebanyak 2 paket Integrasi data dengan capaian Kinerja Persentase Peningkatan Pengelolaan e-Government dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Subkegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas dengan alokasi dana sebesar Rp. 140.570.000,- sampai dengan bulan oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 4.415.000,- (12,09%) dengan realisasi fisik sebesar 25,61%, keluaran dari kegiatan ini FGD Evaluasi dokumen Masterplan E – Government sebanyak 1 Kegiatan dengan capaian Kinerja Persentase Peningkatan Pengelolaan e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan, Alokasi dan Realisasi Dana serta Keluaran dan Hasil Penyelenggaraan Urusan Statistik adalah sebagai berikut:

I. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

A. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota

1. Subkegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan alokasi dana sebesar Rp. 81.293.808,- sampai dengan bulan oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.683.422,- (42,73 %) dengan realisasi fisik sebesar 42,73 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah sarana prasarana sebanyak 2 perangkat dan Jumlah dokumen dan Analisis Statistik Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 4 dokumen dengan capaian kinerja Persentase

Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 23.750.000,- sampai dengan bulan oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.559.000,- (36,04 %) dengan realisasi fisik sebesar 36,04 %, keluaran Jumlah Dokumen yang dikompilasi untuk database sebanyak 1 dokumen, jumlah profil umum daerah sebanyak 1 paket, Jumlah peserta sosialisasi/bimtek sebanyak 60 peserta, Jumlah peserta peningkatan kompetensi wali data sebanyak 1 peserta, Tersedianya alat penunjang sebanyak 1 unit perangkat dengan capaian kinerja Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota

C. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, alokasi dan realisasi dana serta keluaran dan hasil penyelenggaraan urusan Persandian adalah sebagai berikut:

I Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

A. Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

1. Subkegiatan Penetapan kebijakan tatakelola keamanan informasi dan jaring komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 32.947.600,- sampai dengan bulan oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 630.000 (1,91%), dengan realisasi fisik sebesar 1,91 %, keluaran dari kegiatan ini adalah 1 dokumen Kebijakan penyelenggaraan persandian dan 1 kali koordinasi dan capaian Kinerja Persentase Pemahaman Perangkat Daerah akan Penyelenggaraan Urusan Persandian.
2. Subkegiatan Pelaksanaan Analisis kebutuhan dan pengelolaan sumberdaya keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 28.028.000 sampai dengan bulan oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 800.000 (2,85%), dengan realisasi fisik sebesar 2,87%, keluaran dari kegiatan ini 1 kali koordinasi untuk Monitoring dan evaluasi kegiatan persandian dan capaian Kinerja Persentase Pemahaman Perangkat Daerah akan Penyelenggaraan Urusan Persandian.
3. Subkegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota berbasis elektronik dan Non elektronik dengan alokasi dana



sebesar Rp. 53.304.825 sampai dengan bulan oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.930.000 (3,62%), dengan realisasi fisik sebesar 3,62 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah peserta peningkatan kompetensi persandian sebanyak 1 orang, Jumlah Peserta sosialisasi/bimtek urusan persandian sebanyak 50 orang, Terlaksananya layanan keamanan Informasi dan tugas sejenisnya sebanyak 1 laporan, Penambahan peralatan kantor/persandian sebanyak 1 Paket dan capaian Kinerja Persentase Pemahaman Perangkat Daerah akan Penyelenggaraan Urusan Persandian

- D. Sampai dengan bulan Oktober 2021 Program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan tidak ada.
- E. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program kegiatan.
1. Faktor faktor penyebabnya tidak tercapainya target kinerja Program kegiatan Untuk bulan Oktober 2021: Target yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika tercapai semuanya.
 2. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/ kegiatan yang sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah :
 - Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/ kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
 - Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
 - Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.
- F. Implikasi yang Timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026 berdampak positif bagi OPD bagi Dinas Komunikasi dan Informatika karena target target yang ditetapkan telah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.
- Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika.



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T-C.2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK (IKD dalam RP-RMD)	Target Renstra Perangkat Daerah/ RPJMD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2023	2024		
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan.			0	16	18	18	20	22	16	16	18	18	18	Klp
2	Indek keterbukaan Informasi Publik			44,84	78	79	80	81	82	76	44,84	79	80	80	Indeks
3	Nilai Index SPBE Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota			2,68	3,00	3,18	3,40	3,50	3,60	3,17	2,68	3,18	3,40	Indeks	
4	persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			57	70	80	85	90	95	100	100	80	85	%	
STATISTIK															
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			34	50	55	65	75	80	100	100	55	65	%	
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah			34	50	55	65	75	80	100	100	55	65	%	
PERSANDIAN															
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah			23,98	29,65	35,83	41,86	47,47	23,98	0	0	35,83	41,86	%	

Dari Tabel T-C.2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat bahwa :

1. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan pada tahun 2021 tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 tetapi dalam capaiannya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai 16 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang tersebar di Kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Indek keterbukaan publik Tingkat capaian Indek Keterbukaan Informasi Publik yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yang di umumkan pada bulan Desember 2021 tercapai indek 44,84 (Kurang Informatif) dan telah mencapai target perubahan yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021 ini yang disebabkan adanya Refocusing Anggaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang menyebabkan adanya beberapa target kegiatan yang tidak bisa dicapai/ direalisasikan karena pemotongan anggaran ini. Untuk mencapai realisasi ini, harus memenuhi 4 indikator yakni indikator Pengembangan Website, Indikator Pengumuman Informasi Publik, Indikator Pelayanan Informasi Publik dan Indikator Penyediaan Informasi Publik dengan 43 pertanyaan dengan disertai data dukung untuk setiap pernyataan.

keberhasilan dalam pemenuhan penilaian Indikator kinerja ini disebabkan faktor adanya :

1. Telah tersedianya media akses Informasi Publik
2. Telah adanya peraturan yang jelas tentang prosedur layanan informasi publik
3. Adanya komunikasi yang jelas dan konsisten.
4. Sikap Kejujuran, Komitmen dan demokratis.
5. Struktur Organisasi yang sesuai dengan pola kerja dan tata nilai, SOP, koordinasi serta sesuai dengan Tupoksi.



Selain dari faktor pendorong keberhasilan, masih terdapat kekurangan dalam pencapaian kinerja yakni :

1. Faktor Sumber Daya, baik berupa kekurangan personil dan keahlian,
 2. Faktor Sarana dan Prasarana, dan Faktor Pendanaan.
 3. Website Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pembantu tidak rutin di isi/ upload dengan informasi kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mereka.
 4. Penyesuain aktifitas dalam menghadapi Wabah Virus Covid-19.
 5. Kurang Koordinasi/ pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
 6. Ruang untuk pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masih terlalu minim dan tidak memiliki ruang tunggu untuk masyarakat yang akan meminta informasi.
 7. Dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik ada beberapa informasi Publik yang tidak ditemui/ didapatkan oleh tim baik itu di webside Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) maupun data dukung yang dilampirkan dalam kuisisioner.
3. Tingkat capaian Nilai Indek SPBE Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang untuk tahun 2021 yakni 2,68 telah mencapai target perubahan yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021 ini, penurunan target ini yang tertuang pada Perubahan Perjanjian Kinerja disebabkan adanya Refocusing Anggaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang menyebabkan adanya beberapa target subkegiatan yang tidak bisa dicapai/ direalisasikan karena pemotongan anggaran ini.

Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tingkat Kementerian yakni berupa file dan dengan meng-upload bahan/ pembuktian ke <http://spbe.go.id>, dokumen hasil resmi Indek SPBE diumumkan pada tanggal 24 Desember 2021 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik



Indonesia Nomor 1503 Tahun 2021 tentang hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Tujuan SPBE adalah untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Untuk mencapai target yang ditetapkan harus memenuhi 4 (empat) domain yaitu :

1. Domain Kebijakan internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terbagi menjadi :
 - Aspek 1. Kebijakan internal tata kelola SPBE dengan bobot nilai 13% yang terdiri dari 10 indikator penilaian.
2. Domain tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbagi menjadi :
 - Aspek 2. perencanaan strategis dengan bobot nilai 10% dan terdiri dari 4 indikator penilaian.
 - Aspek 3. teknologi informasi dan komunikasi dengan bobot nilai 10% yang terdiri dari 4 indikator penilaian, serta
 - Aspek 4. Penyelenggara SPBE yang terdiri dari 2 indikator
3. Domain Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbagi menjadi:
 - Aspek 5. penerapan manajemen SPBE dengan bobot nilai 12% dan terdiri dari 8 indikator penilaian,
 - Aspek 6. audit TIK dengan bobot nilai 4,5% yang terdiri dari 3 indikator penilaian.
4. Domain Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbagi menjadi:



- Aspek 7: Layanan Admimistrasi Pememerintahan Berbasis Elektronik dengan bobot nilai 27,5% dan terdiri dari 10 indikator penilaian dan
- Aspek 8. Layanan Publik berbasis elektronik dengan bobot nilai 18% dan terbagi menjadi 6 indikator penilaian

Indikator tingkat kematangan dengan disertai data dukung untuk setiap pernyataan sebagai berikut :

DOMAIN 1. Kebijakan Internal SPBE

ASPEK 1. KEBIJAKAN INTERNAL TATA KELOLA SPBE, Bobot nilai 13 %

- Indikator 1 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
- Indikator 2 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah
- Indikator 3 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data di Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah
- Indikator 4 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Indikator 5 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data. Layanan Pusat Data adalah penyediaan penyimpanan aplikasi dan data yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan penyimpanan data bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
- Indikator 6 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Perpres 95 tahun 2018, Pasal 27

- g. Indikator 7 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
- h. Indikator 8 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi. Evidence kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi.
- i. Indikator 9 : Kebijakan internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- j. Indikator 10 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

DOMAIN 2. TATA KELOLA SPBE

ASPEK 2. Perencanaan Strategis SPBE, bobot nilai 10%

- a. Indikator 11 : Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Data dukung : Dokumen Arsitektur SPBE / Rencana Induk TI / Masterplan TIK / Cetak Biru / Master Plan Smart City yang menggambarkan sebagian Referensi Arsitektur SPBE dan/atau Domain Arsitektur SPBE dan didokumentasikan secara formal
- b. Indikator 12 : Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Data dukung : Dokumen Peta Rencana SPBE yang didalamnya mencakup seluruh muatan Peta Rencana SPBE dan Rencana Kerja dan Anggaran 3 (tiga) tahun terakhir yang di dalamnya terdapat Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- c. Indikator 13 : Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE. Eviden : Dokumen Rencana dan Anggaran SPBE

- terpadu dan dokumen RKA/KL atau DPA-SKPD
- d. Indikator 14 : Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE. Eviden Dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan dokumentasi penerapan Inovasi Proses Bisnis melalui sistem elektronik

ASPEK 3 Teknologi Informasi dan Komunikasi, bobot nilai 10%

- a. Indikator 15 : Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE. Eviden Dokumentasi proses pembangunan / pengembangan Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus pembagunan aplikasi dan didokumentasikan secara formal; Dokumentasi aktivitas-aktivitas pembangunan/ pengembangan Aplikasi SPBE; Terdapat notulensi/catatan / laporan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan dan/atau penggunaan Aplikasi SPBE serta bukti undangan rapat evaluasi pembangunan Aplikasi SPBE
- b. Indikator 16 : Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data. Eviden terdapat prosedur pengoperasian baku Layanan Pusat Data, Daftar/katalog unit kerja pengguna pusat data terpusat beserta alamat aksesnya
- c. Indikator 17 : Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Eviden : Dokumentasi unit kerja yang terhubung dalam jaringan internal, untuk menunjukkan adanya jaringan internal yang digunakan, Dapat berupa VPN atau jalur lainnya yang digunakan
- d. Indikator 18 : Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Evidence : Daftar



API yang menggunakan service bus, dan/atau Diagram arsitektur aplikasi dengan service bus. Screenshot yang menunjukkan adanya integrasi antar aplikasi, atau cuplikan source code pemanggilan API, Screenshot berupa bentuk integrasi layanan, middleware (API), dan data. Integrasi dapat berupa pertukaran data antar sistem/aplikasi sehingga tidak diperlukan entri ulang terhadap data yang sudah ada pada sistem/aplikasi lainnya. Integrasi tidak berupa link akses ke web/aplikasi lain, atau akses login ke sistem lain

Aspek 4: Penyelenggara SPBE

- a. Indikator 19 : Tingkat Kematangan Tim **Koordinasi SPBE** Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Evidence SK Tim Koordinasi, Rencana Program Kerja, Dokumentasi Pelaksanaan Program Kerja, Evaluasi atas tugas atau Program Kerja Tim Koordinasi. Dokumentasi aktivitas-aktivitas rapat koordinasi pelaksanaan tugas/program kerja dengan seluruh unit kerja/perangkat. Notulensi/catatan/laporan revidi atau evaluasi tugas program kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- b. Indikator 20 : Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE. Evidence SK **Forum Kolaborasi**, Rencana Program Kerja. Notulensi / catatan/laporan, bukti undangan, dan/atau dokumentasi aktivitas rapat koordinasi Forum Kolaborasi SPBE. Revidi dan evaluasi pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE

Domain 3. MANAJEMEN SPBE, **bobot nilai** 16,50%

ASPEK 5. PENERAPAN MANAJEMEN SPBE, bobot nilai 12%:

- a. Indikator 21 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Risiko SPBE (Salah satu data dukungnya : pedoman internal (level unit) yang diturunkan dari **pemmenpanRB no 5/2020**)
- b. Indikator 22 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Keamanan Informasi (data dukung antara lain pergub/ perwal) atas manajemen keamanan informasi, umumnya disebut **dokumen "Manual SMKI"**
- c. Indikator 23 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Data. Data dukung antara lain pedoman internal (level unit) yang diturunkan dari **PERMENPPN 16/2020**
- d. Indikator 24 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Aset TIK. Data dukung antara lain **pedoman manajemen aset TIK** formal yang ditetapkan
- e. Indikator 25 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Sumber Daya Manusia. Data dukung antara lain dokumentasi telah dilaksanakan pelatihan/sertifikasi dari rencana peningkatan kompetensi, atau adanya hasil penilaian evaluasi kinerja ASN
- f. Indikator 26 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Pengetahuan. contoh data dukung <https://simpan-spbe.bppt.go.id/> <https://spbe.semarangkota.go.id/>
- g. Indikator 27 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Perubahan. Data dukung: renja terkait manajemen perubahan, rencana perubahan/upgrade & prosedur formal yang mencakup proses umum manajemen perubahan SPBE pada **SEMUA** unit kerja

- h. Indikator 28 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Layanan SPBE. Data dukung antara lain Adanya aplikasi Helpdesk TIK yang digunakan

ASPEK 6. AUDIT TIK, bobot nilai 4,5%

- a. Indikator 29 : Tingkat kematangan Audit Infrastruktur SPBE. Data dukung antara lain berupa pedoman audit infrastruktur
- b. Indikator 30 : Tingkat kematangan Audit Aplikasi SPBE. Data dukung pedoman audit aplikasi
- c. Indikator 31 : Tingkat kematangan Audit Keamanan SPBE. Data dukung : pedoman audit keamanan informasi

Domain 4: Layanan SPBE, bobot nilai 45,50%. data dukung : Manual book, Screenshot berjenjang level 1 – 5, Tidak hanya menyertakan halaman login, Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi.

ASPEK 7. LAYANAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, bobot nilai 27,5%

- a. Indikator 32 : Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik
- b. Indikator 33 : Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik
- c. Indikator 34 : Tingkat Kematangan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik
- d. Indikator 35 : Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik
- e. Indikator 36 : Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik
- f. Indikator 37 : Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik

- g. Indikator 38 : Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Elektronik
- h. Indikator 39 : Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik
- i. Indikator 40 : Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik
- j. Indikator 41 : Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik

ASPEK 8. LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK, bobot nilai 18%

- a. Indikator 42 : Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
- b. Indikator 43 : Layanan Data Terbuka
- c. Indikator 44 : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
- d. Indikator 45 : Layanan Publik sektor 1
- e. Indikator 46 : Layanan Publik sektor 2
- f. Indikator 47 : Layanan Publik sektor 3

keberhasilan pencapaian target Indikator kinerja ini disebabkan faktor adanya :

1. Kebijakan Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kebijakan Inovasi Proses Bisnis,
2. Telah adanya Rencana Induk/ Master Plan e-Government Kabupaten Lima Puluh Kota yang berisi kerangka pemikiran dasar, cetak biru pengembangan, Pentahapan pengembangan dan rencana implementasi.
3. Telah adanya peraturan yang jelas tentang prosedur SPBE
4. Telah adanya Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan system penghubung Layanan Pemerintah Daerah.



5. Adanya Infrastruktur SPBE (perangkat keras, pusat data, perangkat jaringan dan komunikasi data, bandwidth, disaster recovery centre).
6. Telah adanya Aplikasi, Website SPBE dan Integrasi system Aplikasi.
7. Struktur Organisasi yang sesuai dengan pola kerja dan tata nilai, SOP, koordinasi serta sesuai dengan Tupoksi.
8. Anggaran dan Belanja Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)/ Dokumenj Perencanaan dan Penganggaran Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), perbup perencanaan dan penganggaran.
9. Layanan Publik berbasis elektronik.

Selain dari faktor pendorong keberhasilan, masih terdapat kekurangan dalam pencapaian kerja yakni :

1. Adanya perubahan pedoman evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara Nasional yang semula berdasarkan Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 95 Tahun 2018 (35 indikator), menjadi Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 (47 Indikator).
2. Kurangnya Perhatian dan Kerjasama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pendukung dalam memenuhi indicator penilaian khususnya untuk indicator baru.
3. Faktor Sumber Daya, baik berupa kekurangan personil dan keahlian, Faktor Sarana dan Prasarana, dan Faktor Pendanaan.
4. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi tidak menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021, akan tetapi Dinas Komunikasi dan Informatika

tetap melaksanakan indikator ini dimana pada Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 7 Aplikasi Layanan Publik yakni:

- a. Aplikasi Covid 19 (<https://covid19.limapuluhkotakab.go.id/>)
- b. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) (<https://dih.limapuluhkotakab.go.id/>)
- c. Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) (<https://ppid.limapuluhkotakab.go.id/>)
- d. Opensid (<https://taram-limapuluhkotakab.desa.id/>)
- e. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) (<http://lpse.limapuluhkotakab.go.id/>)
- f. Smartdukcapil. (<https://smartdukcapil.limapuluhkotakab.go.id/>)
- g. Sp4an Lapor (<https://limapuluhkotakab.lapor.go.id/>)

Dan kesemua Aplikasi Layanan Publik ini telah diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

5. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah telah berjumlah 43 (empat puluh tiga) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hal ini telah disampaikan dalam Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.
6. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah telah berjumlah 43 (empat puluh tiga) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
7. IKK Outcome Mengukur tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten/Kota tidak bisa terlaksana disebabkan karena untuk mengukur ini perlu metode khusus yaitu Indeks KAMI yang belum pernah dilakukan, sehingga belum bisa ditentukan nilai dari indikator ini.

Tabel 2.4 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	Indikator	Target Perangkat Daerah/RP.JMD (Tahun)					Realisasi Capaian (Tahun)			Proyeksi (Tahun)	Catatan Analisis	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021			2023
1	Meningkatkan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	Indek keterbukaan Informasi Publik	44,84	78	79	80	81	82	76	44,84	79	80	
2	Mengembangkan dan Memanfaatkan Sistem Informasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan (e-Government)	Nilai Indek SPBE Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	2,68	3,00	3,18	3,40	3,50	3,60	3,17	2,68	3,18	3,40	
3	Tingkat Pemanfaatan data statistik dalam penyusunan Perencanaan Daerah	Persentase OPD yang menggunakan Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	34	50	55	65	75	80	100	100	55	65	
4	Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Tingkat keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten	23,98	29,85	35,83	41,88	47,47	47,60	0	0	35,83	41,88	

2.3 Isu- isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Indikator Kinerja Utama yang sudah mencapai target yang ditetapkan dan juga dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kominfo sebagaimana berikut:

2.3.1. Tingkat kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika.

- Indikator Indek Keterbukaan Informasi Publik mencapai indek 44,84 (kurang Informatif) dan telah mencapai target perubahan yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2021 penurunan dari tahun sebelumnya disebabkan adanya penambahan indikator penilaian yang baru dan belum dipahami serta saran dan masukan yang belum ditanggapi dari penilaian sebelumnya serta adanya Refocussing Anggaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan.
- Indikator Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Indek 2,68 telah mencapai target perubahan yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2021, penurunan target indikator ini disebabkan adanya Refocussing Anggaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta adanya perubahan indikator dan penambahan indikator penilaian yang baru dan masih belum dipahami oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta masih kurangnya dukungan/ kerjasama dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain terkait dengan pemenuhan penilaian pembuktian data dari indikator.
- Indikator Persentase OPD yang menggunakan Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah dengan persentase sebesar 100 telah mencapai target perubahan yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2021.
- Indikator Tingkat keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten dengan persentase sebesar 0 telah belum mencapai target yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2021, dikarenakan Kabupaten Lima Puluh Kota belum mengikuti penilaian indek yang dilaksanakan oleh BSSN melalui KAMI dan di Propinsi Sumatera Barat hanya Pemerintah Propinsi yang telah mengikutinya.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kominfo, antara lain.

1. Terbatasnya orang ahli Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Persandian, Statistik yang bergabung di Dinas Kominfo
2. Kurangnya kompetensi pelatihan peningkatan.
3. Keterbatasan SDM Teknis



- 
4. Keterbatasan sarana dan prasarana
 5. Keterbatasan anggaran
 6. Terbatasnya Sumber Daya Manusia di Bidang Pengelolaan Infastruktur TIK, Tata Kelola Sistem Keamanan dan Pengelolaan Pusat Data
 7. Belum semua wilayah kabupaten tercover oleh jaringan intra pemerintah
 8. Terbatasnya kewenangan dalam pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Persandian dan Statistik
 9. Belum terselenggaranya teknis pengamanan informasi secara optimal
 10. Belum tersedianya data statistik yang terintegrasi
 11. Tidak Terkoneksinya jaringan di beberapa Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.
 12. Masih belum sinergisitas pengelolaan data dan informasi antar elemen sehingga masih terdapat data dan informasi yang belum komplit, konkrit, benar, valid dan relevan serta real time.

2.3.3. Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyajian visi dan misi ini dalam dokumen perencanaan merupakan implementasi pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan daerah disamping pendekatan lainnya, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, serta atas-bawah dan bawah-atas. Dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pendekatan politis tersebut adalah menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya dibahas bersama dengan DPRD.

Berdasarkan peraturan diatas serta dengan mempertimbangan berbagai permasalahan daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi, capaian pembangunan pada akhir periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, dan berbagai dokumen terkait lainnya seperti: RTRW Daerah 2012-2032, RPJPD 2005-2025, serta dokumen perencanaan provinsi dan kabupaten/kota yang berdekatan, maka visi pembangunan daerah untuk tahun 2021 – 2026

adalah:

VISI :

**"MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA
DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH**

Pada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 3 (tiga) kata kunci yaitu Madani, Beradat dan Berbudaya, Nilai nilai adat Basandi Syarak, syarak basandi kitabullah. Masing-masing kata kunci tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Madani.

Madani adalah Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang harmonis, demokratis, menjunjung tinggi etika, moralitas transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral emansipasi, menghargai hak asasi dan nilai nilai kemanusiaan serta maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Beradat dan berbudaya

Beradat dan berbudaya adalah Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang santun bertutur kata, sopan dalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat luas.

3. Nilai nilai adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah

Nilai nilai adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah adalah kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, Lembaga, organisasi dan masyarakat secara Bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalaan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaska kepada ajaran agama islam.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Disamping itu, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik daerah terhadap *stakeholder*. Ada banyak *stakeholder* pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan.



Dalam upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan kelmanan.
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat local dan regional.
3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas Layanan publik melalui Reformasi Birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Strategi dan Arah kebijakan dalam Renstra 2021-2026

Ada beberapa masalah penting yang harus diselesaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota dengan strategi dan kebijakan, beberapa masalah tersebut adalah:

1. Belum tersedianya Sumber Daya Manusia yang kompeten dan inovatif berbasis TIK, Persandian dan Statistik.
2. Kurang tersedianya sarana dan prasarana Bidang TIK, Pesandian dan Statistik
3. Belum berkembangnya sistem dan aplikasi pelayanan publik terintegrasi, aman terpadu, menyeluruh dan mudah di akses masyarakat.
4. Belum memiliki legalitas formal berupa Perda yang mendukung penggunaan dan pemanfaatan TIK, Persandian dan Statistik di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Terbatasnya biaya operasional perawatan Infrastruktur perangkat keras dan infrastruktur perangkat lunak
6. Terbatasnya jaringan internet dan intranet di Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Masih rendahnya ketersediaan data statistik di berbagai bidang untuk kepentingan pembangunan daerah.
8. Rendahnya pemahaan persandian di daerah.
9. Lima Puluh Kota Menuju Smart City.
10. Belum tersedianya Media Center dan Videotron untuk penyampaian informasi ke masyarakat.
11. Masih rendahnya system keamanan informasi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah.

a) Tantangan :

Dengan bergabungnya Bidang Infrastruktur TIK dan Bidang e-Government menjadi Bidang Aplikasi dan Informatika, dan Seksi Persandian menjadi Bidang Persandian dan Manajemen Data Elektronik serta Bagian Layanan Hubungan Masyarakat (Humas) yang sebelumnya berada di salah satu Bagian Sekretariat Daerah sekarang dialihkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika hal tersebut merupakan tantangan – tantangan yang harus dihadapi Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan dengan sumber daya manusia dan dengan berbagai macam keterbatasan yang ada. Sementara menurut tusinya Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan lembaga teknis daerah yang cukup strategis dalam menentukan kebijakan program pengembangan bidang telematika, Persandian dan Statistik di daerah, kurangnya jumlah Pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh menjadi permasalahan internal karena dalam menjalankan tusinya diperlukan faktor-faktor pendukung Sumber Daya Manusia. Perkembangan teknologi komunikasi, persandian dan Data di Indonesia selalu berjalan dari masa kemasa. Sebagai Negara yang sedang berkembang, selalu mengadopsi berbagai teknologi informasi hingga akhirnya tiba di suatu masa di mana penggunaan internet mulai menjadi “makanan” sehari-hari yang dikenal dengan teknologi berbasis internet (*internet based technology*).

Saat ini pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pengamanan informasi dan data sedang menuju pada era *smart city*, yang melibatkan sektor pemerintah (*government*) selaku fasilitator, sektor publik (*citizen*) selaku pengguna layanan informasi dan komunikasi, dan sektor komunitas (*business*) selaku mitra pemerintah dalam melakukan berbagai terobosan dan inovasi di bidang teknologi informasi, komunikasi, persandian dan data. Pelaksanaan teknologi informasi, komunikasi, persandian dan data didalam *Smart City* merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi, persandian dan data telah menjadi fasilitas utama bagi kegiatan di berbagai sektor kehidupan dimana juga memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, lingkungan, UKM (Usaha Kecil Menengah), perhubungan dan perizinan. Oleh karena itu sangatlah penting peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pengamanan informasi dan data, mulai dari keterampilan dan pengetahuan, perencanaan, pengoperasian, perawatan dan pengawasan, serta peningkatan kemampuan TIK para pimpinan di

lembaga pemerintahan, pendidikan, UKM (Usaha Kecil Menengah) dan komunitas TIK. Sehingga pada akhirnya akan dihasilkan output yang sangat bermanfaat baik bagi manusia sebagai individu itu sendiri maupun bagi semua sektor kehidupan. Berikut beberapa tantangan yang di hadapi oleh Dinas Komunikasi.

1. Bagian Hubungan Layanan Masyarakat (Humas) yang sebelumnya berada di salah satu bagian Sekretariat Daerah sekarang dialihkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Kurang memadainya Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan Kapasitas Teknis juga menjadi permasalahan internal karena dalam menjalankan tugas diperlukan faktor-faktor pendukung Sumber Daya Manusia
3. Belum tersedianya media center untuk penyampaian informasi kepada masyarakat.
4. Semakin cerdasnya masyarakat terkait kebutuhan akan informasi (Keberadaan UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk mengakses informasi publik)
5. Kurang memadainya sarana media luar ruang, seperti rangka baliho, billboard, spanduk, dan videotron
6. Belum tersedianya mobil unit penyampaian informasi
7. Konten hoax yang beredar dimasyarakat
8. Belum tersedianya radio pemerintah daerah
9. Belum tersedianya studio mini
10. Penyesuaian aparatur guna pelaksanaan tugas.
11. Maraknya serangan cyber terhadap keamanan informasi.
12. Belum maksimalnya proses pengembangan warehouse data kabupaten
13. Kondisi wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota yang sangat luas sangat berpengaruh dalam pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
14. Sudut pandang Aparatur Pemerintahan dalam mendukung pembangunan maupun pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik
15. Belum semua penggunaan dan pemanfaatan TIK memiliki dukungan legalitas secara formal dalam hal ini berupa Perbup maupun Perda.
16. Terbatasnya anggaran dalam pengadaan maupun perawatan infrastruktur baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak.
17. Kecenderungan perpindahan mekanisme aktifitas pekerjaan dari pola manual menjadi pola elektronik yang semakin hari semakin meningkat, sehingga akan menambah besar peluang pihak-pihak yang tidak memiliki otoritas untuk melakukan aksi-aksi kejahatan di dunia siber, maka secara otomatis akan



mengakibatkan beban tugas dari Persandian untuk Pengamanannya juga akan semakin besar dan semakin strategis.

18. Rendahnya kesadaran ketepatan waktu penyerahan data dari produsen data
19. Belum optimalnya pemeriksaan data
20. Belum tersedianya Perbup tentang Satu Data Indonesia
21. Belum terintegrasinya data statistik dalam suatu system
22. Sulitnya mengumpulkan Informasi Publik dari Perangkat Daerah (baik softcopy maupun hardcopy) dalam menetapkan DIDP
23. Sulitnya berkoordinasi dengan OPD untuk melakukan uji konsekwensi maupun pengklasifikasian Informasi Publik.
24. Rendahnya respon PPID Pembantu terkait tindak lanjut permohonan informasi publik.
25. Rendahnya respon OPD terkait dalam menanggapi pengelolaan pengaduan masyarakat.
26. Minimnya pengetahuan pelapor tentang tata cara pengelolaan pengaduan masyarakat.
27. Minimnya sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara mendapatkan informasi dan tata cara pengaduan masyarakat.
28. Belum tersedianya Sumber Daya Manusia yang kompeten dan inovatif berbasis TIK.
29. Kurang tersedianya sarana dan prasarana pendukung pada setiap Bidang.
30. Belum optimalnya pelaksanaan sistem Pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu
31. Belum berkembangnya sistem dan aplikasi pelayanan publik terintegerasi, aman terpadu, menyeluruh dan mudah di akses masyarakat
32. Belum memiliki legalitas formal (Perda, Perbup) yang mendukung penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Persandian, Komunikasi Publik, Humas dan Statistik di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
33. Masih banyaknya Daerah Blankspot dan terbatasnya jaringan internet dan intranet di Kabupaten Lima Puluh Kota
34. Masih rendahnya kualitas dan ketersediaan data statistik di berbagai bidang untuk kepentingan pembangunan daerah.
35. Belum optimalnya identifikasi dan pelaksanaan tugas – tugas persandian daerah.
36. Lima Puluh Kota Menuju Smart City.

b) Peluang :

Dinas Komunikasi dan Informatika berdiri sendiri menjadi Dinas maka sesuai dengan tugasnya merupakan lembaga teknis daerah yang cukup strategis dalam menentukan kebijakan program pengembangan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, bidang statistik dan bidang persandian di daerah, agar pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Berikut beberapa peluang yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

1. Adanya peranan Media Cetak, Media Online, Media Luar Ruang, dan Media Penyiaran yang cukup besar dalam penyebarluasan informasi.
2. Keinginan yang tinggi dari masyarakat untuk memperoleh informasi.
3. Komitmen dan dukungan dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan terkait pengelolaan data
4. Pengembangan *warehouse* data Kabupaten
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang analisis data.
6. Kerjasama di bidang pengelolaan dan pengembangan infrastruktur TIK dengan pihak penyedia
7. Pengembangan jaringan intra pemerintah ke seluruh wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota
8. Meningkatnya komputerasi di seluruh tingkat pemerintahan seiring dengan pemakaian fasilitas-fasilitas Teknologi Informasi yang disediakan.
9. Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh aparatur seiring dengan peningkatan kinerja terkait pemanfaatan Teknologi Informasi.
10. Peningkatan kuantitas bimbingan-bimbingan teknis di Bidang Infrastruktur TIK termasuk Pusat Data Kabupaten baik dalam pengelolaan maupun keamanan.
11. Peningkatan kualifikasi Pusat Data sehingga akan memenuhi standar yang telah ditentukan
12. Meningkatkan tata kelola sistem keamanan Teknologi Informasi
13. Menjalinkan Kerjasama dengan pihak penyedia layanan informasi BUMN.
14. Daerah yang termasuk dalam Daftar Blank Spot Signal Telekomunikasi di usulkan / fasilitasi melalui operator telekomunikasi agar mau berinvestasi sehingga seluruh daerah menjadi berdering.
15. Reformasi birokrasi dengan *e-Government* mendukung terciptanya *Good Government and Clean Governance*.
16. Pelaksanaan E-Government

- 
17. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi di seluruh kecamatan dan nagari.
 18. Peningkatan kebutuhan keterbukaan informasi publik baik pada lingkup masyarakat, dunia bisnis dan antar pemerintah melalui berbagai media.
 19. Peningkatan kualitas dan ketersediaan data statistik di berbagai bidang untuk kepentingan pembangunan daerah
 20. Sosialisasi dan Pelatihan persandian.
 21. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam mengembangkan informasi antara lain Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berbasis IT.
 22. Adanya peranan media massa cetak dan elektronik yang cukup besar dalam menyebarluaskan informasi.
 23. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan kinerja aparatur yang tentunya meningkatkan kualitas layanan public.

2.3.5. Formulasi isu-isu penting dalam pelayanan perangkat daerah.

Dari hasil pengamatan dapat diidentifikasi isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat daerah sebagai berikut:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Belum optimalnya kinerja pelayanan komunikasi dan informasi.
3. Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) guna penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab.
4. Indeks Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dari Menpan-RB
5. Keharusan pemanfaatan data melalui satu data Indonesia
6. Tuntutan aparatur akan data yang akurat dalam pelaksanaan kegiatan
7. Peningkatan ketersediaan data dan informasi melalui sumber daya teknologi informasi
8. Penyusunan regulasi terkait penggunaan data dalam kegiatan pemerintahan.
9. Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi khususnya Infrastruktur TIK, Pusat Data dan Tata Kelola Sistem Keamanan untuk mendukung kinerja aparatur dalam pelaksanaan kegiatan.

10. Melengkapi semua legalitas formal yang dibutuhkan dalam pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Persandian dan Statistik sehingga setiap kegiatan ada regulasinya
11. Masih terdapatnya titik-titik blank spot di beberapa wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota
12. Tingginya kebutuhan masyarakat umum akan adanya jaringan internet di daerah mereka
13. Peningkatan kualifikasi Pusat Data kabupaten sehingga mencapai standar yang seharusnya
14. Pengembangan jaringan intra sehingga mencapai seluruh wilayah pemerintahan
15. Peningkatan tata kelola sistem keamanan Teknologi Informasi
16. Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi harus seiring dengan peningkatan pengamanan informasi dan sistem informasi itu sendiri
17. Pembangunan membutuhkan data sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan. Data yang berkualitas akan menghasilkan kebijakan yang tepat, namun sebaliknya akan bias jika didasarkan pada data yang tidak akurat. Sehingga tersedianya data yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan menjadi hal yang penting bagi tepatnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
18. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan informasi publik dan memanfaatkan saluran pengaduan masyarakat atas pelayanan publik. Tingginya kebutuhan atas informasi publik dan kecenderungan masyarakat yang semakin kritis menuntut peningkatan kualitas pelayanan informasi publik dan pengaduan masyarakat
19. Meningkatnya praktik pemerintahan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (*e-Government*) untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang prima dan manajemen pemerintahan.
20. Tuntutan yang cukup besar dari publik akan layanan akses internet yang memadai.
21. Masih terdapatnya daerah *blank spot* di beberapa Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.
22. Pengoptimalan sumber daya teknologi informasi untuk melancarkan arus komunikasi dan informasi bagi masyarakat.
23. Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan berbasis Teknologi Informasi melalui keterbukaan informasi publik.
24. Peningkatan ketersediaan data dan informasi serta penyebarluasannya melalui pemanfaatan Sumber Daya Manusia dibidang IT.
25. Pengembangan TIK guna mengintegrasikan data dan informasi antar OPD untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan data dan informasi serta meminimalkan kerusakan dan kejahatan didunia maya.

- 
26. Memperkuat regulasi komunikasi dan tata kelola TIK untuk mewujudkan sinergitas media komunikasi penataan dan penertiban menara telekomunikasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab ini berisikan uraian mengenai perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dijelaskan juga mengenai alasan proses tersebut dilakukan serta penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

Tabel T-C.31



TABEL T - C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Awal RKPD 2023			Hasil Analisis Kebijakan			Kebutuhan Dana	Catatan Penting		
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Papir Inisiatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian	
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2												
2.16.01.2.02.0	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					13,726,016,432						
2.16.01.2.02.0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					11,646,281,808						
2.16.01.2.02.0	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	35%	6,308,072,000							
2.16.01.2.02.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	12 Bulan	3,498,285,684							
2.16.01.2.02.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 orang/ bulan	3,399,228,694							
2.16.01.2.02.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Bulan	9,062,000							
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah peningkatan Kepegawaian Perangkat Daerah	30%	88,490,000							
2.16.01.2.05.0	Pengadaan Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	88,400,000							
2.16.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	602,495,000							
2.16.01.2.05.0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ kebutuhan komponen instalasi listrik/ penangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	15,246,000							
2.16.01.2.05.0	Penyediaan perbaikan dan perlengkapan kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah paket Perawatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	3 paket	102,660,000							
2.16.01.2.05.0	Penyediaan pemastian rumah tangga	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah paket Perawatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	28,000,000							
2.16.01.2.05.0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	2 paket	62,793,000							



Rencana Awal RKPD 2023										Hasil Analisis Kebijakan		
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Papir Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebijakan Dasar	Caraka Pening	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.16.01.2.05.0	Persediaan Barang Cetak dan Penggantian	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah paket barang cetak dan penggantian yang disediakan	1 paket	51,705,000	Persediaan Barang Cetak dan Penggantian	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah paket barang cetak dan penggantian yang disediakan	1 paket	51,705,000		
2.16.01.2.05.0	Facilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	6,880,000	Facilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	6,880,000		
2.16.01.2.05.0	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah laporan penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	355,232,000	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah laporan penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	355,232,000		
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 unit	1,166,631,200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 unit	1,166,631,200		
2.16.01.2.07.0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	748,987,700	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	748,987,700		
2.16.01.2.07.0	Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	408,643,500	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas operasional atau lapangan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	408,643,500		
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	913,893,920	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	913,893,920		
2.16.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,042,500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,042,500		
2.16.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	173,378,000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	173,378,000		
2.16.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	338,473,420	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	338,473,420		
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Peningkatan Pemeliharaan Barang milik Daerah agar dalam kondisi baik	21 Unit	538,481,196	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Peningkatan Pemeliharaan Barang milik Daerah agar dalam kondisi baik	21 Unit	538,481,196		
2.16.01.2.09.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perincian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya	5 Unit	315,071,186	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perincian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya	5 Unit	315,071,186		



Rencana Awal RKPD 2023

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikasi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kolaborasi	Instansi Mitra/ Mitra	TARGET CAPAIAN	Kolaborasi Dana	Cabang Peningkat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.16.01.2.01.0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	14 unit	10.900,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	14 unit	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	14 unit	10.900,000	13
2.16.01.2.09.0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/ Rehabilitasi	2 unit	210.010,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/ Rehabilitasi	2 unit	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/ Rehabilitasi	2 unit	210.010,000	13
2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan Domains Informasi dan Komunikasi Publik	30%	1.735.987,000	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan Domains Informasi dan Komunikasi Publik	30%	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan Domains Informasi dan Komunikasi Publik	30%	1.735.987,000	13
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	30%	1.735.987,000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	30%	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	30%	1.735.987,000	13
2.16.02.2.01.0	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 dokumen	366.400,000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 dokumen	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 dokumen	366.400,000	13
2.16.02.2.01.04	Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Informasi Publik	30 dokumen	136.000,000	Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Informasi Publik	30 dokumen	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Informasi Publik	30 dokumen	136.000,000	13
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Layanan Hubungan Media	3 layanan	1.080.186,500	Layanan Hubungan Media	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Layanan Hubungan Media	3 layanan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Layanan Hubungan Media	3 layanan	1.080.186,500	13
2.16.02.2.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	24 dokumen	112.400,000	Manajemen Komunikasi Krisis	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	24 dokumen	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	24 dokumen	112.400,000	13
02.16.02.	Program Aplikasi Informatika	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan layanan informasi dan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	87%	3.602.212,800	Program Aplikasi Informatika	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan layanan informasi dan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	87%	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan layanan informasi dan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	87%	3.602.212,800	13
02.16.02.3.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	87%	2.427.899,000	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	87%	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase peningkatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	87%	2.427.899,000	13
02.16.02.3.01.02	Pendaftaran dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	5 dokumen	77.512,000	Pendaftaran dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	5 dokumen	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	5 dokumen	77.512,000	13
02.16.02.3.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah sistem jaringan intra pemerintahan daerah	60 unit	2.350.187,000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah sistem jaringan intra pemerintahan daerah	60 unit	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah sistem jaringan intra pemerintahan daerah	60 unit	2.350.187,000	13



Rencana Awal RKPD 2023										Host Analisis Kebijakan		
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kabupaten/ Kota	Cabang/ Peningkat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
02.16.03.2.02	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan e-Government di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	83%	1,174,513,898	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan e-Government di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	83%	1,174,513,898		
02.16.03.2.02.01	Peratualaksanaan dan Pengawasan e-governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen hasil Peratualaksanaan dan Pengawasan e-governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	180,958,000	Peratualaksanaan dan Pengawasan e-governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen hasil Peratualaksanaan dan Pengawasan e-governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	180,958,000		
02.16.03.2.02.02	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah pusat data pemerintah yang dikelola	1 unit	355,399,432	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah pusat data pemerintah yang dikelola	1 unit	355,399,432		
02.16.03.2.02.03	Koordinasi dan Singkronisasi Data dan Informasi Elektronik Berbasis Elektronik	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah perangkat daerah yang menaungi Koordinasi dan Singkronisasi Data dan Informasi Elektronik Berbasis Elektronik	43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	147,212,808	Koordinasi dan Singkronisasi Data dan Informasi Elektronik Berbasis Elektronik	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah perangkat daerah yang menaungi Koordinasi dan Singkronisasi Data dan Informasi Elektronik Berbasis Elektronik yang Diembangkan	43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	147,212,808		
02.16.03.2.02.04	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Diembangkan	5 unit	233,523,500	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Diembangkan	5 unit	233,523,500		
02.16.03.2.02.05	Penyenggaraan Sistem Penghubung Layanan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan	2 layanan	102,070,000	Penyenggaraan Sistem Penghubung Layanan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan	2 layanan	102,070,000		
02.16.03.2.02.06	Pengembangan dan Pengelolaan Esosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Smart City	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Dimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	151,350,068	Pengembangan dan Pengelolaan Esosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Smart City	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Dimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	151,350,068		
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase Pemantauan data/ informasi/ Statistik Daerah	83%	485,782,424	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase Pemantauan data/ informasi/ Statistik Daerah	83%	485,782,424		
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota	83%	485,782,424	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota	83%	485,782,424		
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan Disseminasi Data Statistik Sektoral	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Disseminasi Data Statistik Sektoral	10 dokumen	95,194,000	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan Disseminasi Data Statistik Sektoral	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Disseminasi Data Statistik Sektoral	10 dokumen	95,194,000		



Rencana Awal RKPD 2023

Hasil Analisis Kebutuhan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Kebijakan/ Sasaran	Dokumen/ Peningkatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Monev Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah SDM yang Mengingat Kapasitasnya dalam Penyelenggaraan Monev Statistik Daerah yang Terintegrasi	4 orang	50.007,400	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Monev Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah SDM yang Mengingat Kapasitasnya dalam Penyelenggaraan Monev Statistik Daerah yang Terintegrasi	4 orang	50.007,400	
2.20.02.2.01.03	Membangun Monev Data Statistik Sekotral	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Mendata Statistik Sekotral yang Dihimpun	10 dokumen	70.705,708	Membangun Monev Data Statistik Sekotral	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Mendata Statistik Sekotral yang Dihimpun	10 dokumen	70.705,708	
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kolaborasi Statistik Sekotral	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sekotral dari BPS	42 Orang	73.068,508	Peningkatan Kapasitas Kolaborasi Statistik Sekotral	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sekotral dari BPS	42 Orang	73.068,508	
2.20.02.2.01.05	Penyelenggaraan Oborasi Statistik Sekotral di Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Data Statistik Sekotral yang Dihimpun	4 dokumen	107.155,809	Penyelenggaraan Oborasi Statistik Sekotral di Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Data Statistik Sekotral yang Dihimpun	4 dokumen	107.155,809	
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Penguatan Informatika	Kabupaten Lima Puluh Kota	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	35,83%	1.673.974,200	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Penguatan Informatika	Kabupaten Lima Puluh Kota	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	35,83%	1.673.974,200	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk penguatan informasi pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase pemeliharaan Perangkat Daerah akan penyelenggaraan Urusan Persandian	35,83%	1.642.290,200	Penyelenggaraan Persandian untuk penguatan informasi pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase pemeliharaan Perangkat Daerah akan penyelenggaraan Urusan Persandian	35,83%	1.642.290,200	
2.21.02.2.01.01	Peningkatan kapasitas stakeholder keamanan informasi dan jaring komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Kegiatan Tera Kelela Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditujukan	2 dokumen	30.865,000	Peningkatan kapasitas stakeholder keamanan informasi dan jaring komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Kegiatan Tera Kelela Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditujukan	2 dokumen	30.865,000	
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis kebutuhan dan pengujian sumberdaya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengujian Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	54.890,000	Pelaksanaan Analisis kebutuhan dan pengujian sumberdaya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengujian Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	54.890,000	



Rencana Awal RPJPD 2023

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Rinefis	Target Capaian	Kumulatif Dasar	Carabe Posing
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanahan Informasi pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota berbasis elektronik dan Non elektronik.	Kabupaten Lima Puluh Kota.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanahan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.	4 Laporan	282,963,600	Pelaksanaan Keamanahan Informasi pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis elektronik dan Non elektronik.	Kabupaten Lima Puluh Kota.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanahan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.	4 Laporan	282,963,600	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanahan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota.	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Mengumumkan Layanan Keamanahan Informasi	43 Perangkat Daerah	1,170,600,700	Penyediaan Layanan Keamanahan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota.	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Mengumumkan Layanan Keamanahan Informasi	43 Perangkat Daerah	1,170,600,700	Berjalan Prowell yang telah habis masa berlakunya 5 tahun.
2.21.02.2.02	Pemetaan Pola Hubungan Komunikasi Sani antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota.	Kabupaten Lima Puluh Kota.	Peningkatan Pola Hubungan Komunikasi Sani antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota.	43 Perangkat Daerah	131,875,000	Pemetaan Pola Hubungan Komunikasi Sani antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota.	Kabupaten Lima Puluh Kota.	Peningkatan Pola Hubungan Komunikasi Sani antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota.	43 Perangkat Daerah	131,875,000	
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sani Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota.	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sani	43 Perangkat Daerah	131,875,000	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sani Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota.	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sani	43 Perangkat Daerah	131,875,000	Walaupun ada dalam rencana program, kegiatan dan subkegiatan pada bidang yang sebelumnya (yang sebelumnya berada pada Urusan dan Bidang yang berbeda)
					13,726,618,432					13,726,618,432	



Dari table T-C.31 diatas dapat dijelaskan bahwa Rencana Awal RKPD 2023 telah disusun berdasarkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2023. Dimana dalam penentuan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Lima Puluh Kota Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota berupaya untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan pelaksanaan subkegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Daerah (IKD) yakni:

No.	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	SubKegiatan	Pagu Dana
1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan.	Kemitraan dengan pemangku kepentingan	70.391.400
2.	Indek keterbukaan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 2. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah. 3. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 4. Pengelolaan Media Komunikasi Publik 5. Pelayanan Informasi Publik 6. Layanan Hubungan Media 7. Manajemen Komunikasi Krisis 8. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 9. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas. 10. Penyediaan/Pengadaan Saranan dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kota. 	5.320.724.208



No.	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	SubKegiatan	Pagu Dana
3.	Nilai Indek SPBE Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah. 3. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 4. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 5. Koordinasi dan Singkronisasi Data dan Informasi Elektronik 6. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 7. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas 	11.786.577.884
4.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan Secara Online dan terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.	60.000.000
5.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral. 2. Membangun Meta Data Statistik Sektoral. 3. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah. 	413.000.000



No.	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	SubKegiatan	Pagu Dana
6.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi. 2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 	175.000.708
7.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan tatakelola keamanan informasi dan jaring komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. 2. Pelaksanaan Analisis kebutuhan dan pengelolaan sumberdaya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 3. Pelaksanaan Keamanan Informasi pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota berbasis elektronik dan Non elektronik 4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 	1.203.000.000

1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 ini secara umum sudah menampung hasil usulan para pemangku kepentingan. Terkait dengan usulan dari pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika tidak memperoleh usulan secara langsung melalui Musrenbang baik mulai dari Musrenbang Nagari, Kecamatan sampai dengan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten maupun Four- OPD, akan tetapi kebutuhan masyarakat terkait kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah sudah



diakomodir dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika. Sehubungan dengan keadaan diatas, maka tabel usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 tidak ada penjelasannya

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, tidak ada lagi Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini ditegaskan kembali melalui Surat Menteri PPN/ Kepala Bappenas nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 yang menambahkan teknis perumusan visi dan misi dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kemenkominfo akan berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: **"Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong."**

Pada pelaksanaannya, pencapaian visi tersebut dilakukan sesuai tugas Kemenkominfo yang disebutkan pada Perpres Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, serta Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Seperti halnya visi, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, misi Menteri/Pimpinan Lembaga wajib mengacu pada misi Presiden dan Wakil Presiden.

Berikut adalah penjabaran visi, misi Presiden dan 7 agenda pembangunan.

Gambar II.1 Penjabaran Visi Misi Presiden



Sumber: Ringkasan Eksekutif RPJMN 2020-2024



Sesuai dengan perannya, Kemenkominfo dapat mendukung pelaksanaan 9 misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian, Kemenkominfo akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, 2, 3, 5, 8, dan 9 dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tujuan Kemenkominfo merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai di tahun 2024. Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber dayamanusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;



6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mencapai sasaran strategis, Kemenkominfo mengoptimalkan fungsi-fungsi kementerian yang dapat digambarkan dalam kerangka sebagai berikut ini:

Gambar II.2 Kerangka Renstra Kemenkominfo 2020—2024



*termasuk sektor kesehatan dan sektor pendidikan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selain merupakan penjabaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, maka Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021. Dalam merumuskan tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika maka berdasarkan RKPD tersebut diformulasikan tujuan yang ingin di capai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sesuai penjabaran VISI dan MISI dan juga merupakan cermin dari adanya peningkatan kinerja aparatur secara menyeluruh untuk semua pegawai negeri sipil dan pegawai harian di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika yang berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan.

Adapun tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

“ Meningkatkan Kualitas Layanan Publik melalui Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Data dan Persandian”

Adapun Sasaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Meningkatkan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik
2. Mengembangkan dan Memanfaatkan Sistem Informasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan (e-Government)
3. Meningkatkan pemanfaatan data statistik dalam penyusunan perencanaan daerah
4. Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah.
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik melalui Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Data dan Persandian	Meningkatkan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	Indek keterbukaan Informasi Publik	79,00
		Mengembangkan dan Memanfaatkan Sistem Informasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan(e-Government)	Nilai Indek SPBE Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	3,18
		Tingkat Pemanfaatan data statistik dalam penyusunan Perencanaan Daerah	Persentase OPD yang menggunakan Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	55,00

		Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Tingkat keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten	35,83
--	--	--	---	-------

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang dimuat dalam Rencana Kerja tahun 2023 dimaksudkan untuk mendukung visi dan misi Bupati, sementara nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No. 90 tahun 2019 dan Permendagri No. 59 tahun 2010 serta Permendagri No. 21 tahun 2011.

Faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam hal penetapan Program/Kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah terkait dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026 dimana sesuai dengan fungsi dan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika erat kaitannya dengan pencapaian misi ke-4, yaitu ***"Meningkatkan Kualitas Layanan Publik melalui reformasi Birokrasi Seutuhnya"***.

Dari penelaahan terhadap faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dihasilkanlah 6 program prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik
2. Program Aplikasi Informatika
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
5. Program penunjang urusan pemerintahan daerah

Program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yaitu:

1. Program dan kegiatan pada setiap OPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin;
2. Program dan kegiatan yang terkait dengan urusan Komunikasi dan Informatika
3. Program dan kegiatan yang terkait dengan urusan Statistik.
4. Program dan kegiatan yang terkait dengan urusan Persandian.

Ringkasan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 3.4
Program kegiatan dan Subkegiatan yang ada pada setiap OPD

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor 2. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor 3. Penyediaan peralatan rumah tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Fasilitasi Kunjungan Tamu 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jml	1 Program	6 Kegiatan	18 Subkegiatan

Tabel 3.8
Program dan Kegiatan lingkup Urusan Komunikasi dan Informatika

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	1. Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2. Pelayanan Informasi Publik 3. Layanan Hubungan Media 4. Manajemen Komunikasi Krisis.

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
		Kabupaten/ Kota	
2.	Program Aplikasi Informatika	1. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.	1. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi 2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
		2. Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi 2. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah. 3. Koordinasi dan Singkronisasi Data dan Informasi Elektronik. 4. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 5. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan 6. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
Jml	2 Program	3 Kegiatan	12 Subkegiatan

Tabel 3.9
Program dan Kegiatan lingkup Urusan Statistik

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral. 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu Statistik Daerah yang terintegrasi. 3. Membangun Meta Data Statistik Sektoral 4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral. 5. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
Jml	1 Program	1 Kegiatan	5 Subkegiatan

Tabel 3.10
Program dan Kegiatan lingkup Urusan Persandian

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.	1. Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.	1. Penetapan kebijakan tatakelola keamanan informasi dan jaring komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 2. Pelaksanaan Analisis kebutuhan dan pengelolaan sumberdaya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 3. Pelaksanaan Keamanan Informasi pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota berbasis elektronik dan Non elektronik. 4. Penyediaan Layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
		2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota.	1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Jml	1 Program	2 Kegiatan	5 Subkegiatan

T-B.36

Identifikasi permasalahan untuk penentuan program prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota Analisa data capaian Kinerja Tahun 2021 atau 2022

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interprestasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor -faktor penentu keberhasilan
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan			Baru diusulkan dalam RPJMD 2021 - 2026
2	Indek keterbukaan Informasi Publik			Baru diusulkan dalam RPJMD 2021 - 2026
3	Nilai Indek SPBE Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota			Baru diusulkan dalam RPJMD 2021 - 2026
4	persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			Baru diusulkan dalam RPJMD 2021 - 2026
	STATISTIK			
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			Baru diusulkan dalam RPJMD 2021 - 2026



No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interprestasi belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor -faktor penentu keberhasilan
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah			Baru diusulkan dalam RPJMD 2021 - 2026
	PERSANDIAN			
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah			Baru diusulkan dalam RPJMD 2021 - 2026



**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dasar/ Pagu Indikatif
1			4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERTKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				13,725,018,432				20,839,745,651
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				11,949,281,808				19,429,445,651
2.16.01	Program pemajang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Kota	Jumlah peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	35%	6,309,072,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kelancaran operasional dan pelaksanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).	45%	8,407,881,235
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Jumlah Peningkatan Administrasi Keuangan	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Bulan	3,408,280,894	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan penatausahaan keuangan guna penyajian laporan keuangan yang tepat waktu.	12 Bulan	4,337,760,152
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Komunikasi dan Informatika	42 orang/ bulan	3,399,236,694	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kegiatan Rutin Dinas	42 orang/ bulan	4,331,249,905
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	9,002,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kegiatan Rutin Dinas	1 Laporan	8,511,262
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah peningkatan Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	35%	88,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan pelayanan Administrasi Kepegawaian Dinas.	45%	140,862,500
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Beserta Atribut Kelembagaannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelembagaannya	Dinas Komunikasi dan Informatika	3 Paket	88,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kegiatan Rutin Dinas	4 Paket	140,862,500



Kode	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Pening	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Piparaan Majo Rencana Tahun 2023	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Dana/Pagu Indikatif	Dana							
1													
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peningkatan Administrasi Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 bulan	602,486,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan administrasi Umum guna kelancaran operasional dinas.	12 bulan	666,433,883				
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Laboratorium/Peralatan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi serta kebutuhan komponen instalasi/bantu perancangan bangunan kantor yang abstrakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 paket	15,245,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kegiatan Rutin Dinas	1 paket	6,640,300				
2.16.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang diandalkan	Dinas Komunikasi dan Informatika	3 paket	102,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kegiatan Rutin Dinas	3 paket	113,854,300				
2.16.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket Perabotan rumah tangga yang disediakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	2 paket	26,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kegiatan Rutin Dinas	2 paket	3,980,000				
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	2 paket	62,763,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kegiatan Rutin Dinas	2 paket	96,661,400				
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Sarang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 paket	51,705,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kegiatan Rutin Dinas	1 paket	81,732,503				
2.16.01.2.06.08	Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Laporan	6,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kegiatan Rutin Dinas	12 Laporan	6,721,500				
2.16.01.2.06.09	Pengembangan Royal Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Royal Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Laporan	305,232,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kegiatan Rutin Dinas	12 Laporan	257,150,000				

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Praktisi Madya Pencapaian Tahun 2023
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebunahan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	8 Unit	1.156.851.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 25 Unit 2.196.150.000	
2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	2 unit	748.987.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 unit 1.851.650.000	
2.16.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau belangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	6 unit	409.543.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 unit 544.500.000	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 bulan	613.883.820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan 708.686.300	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Laporan	2.042.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan 1.736.000	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Laporan	173.378.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan 273.879.000	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	12 Laporan	338.473.420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan 433.071.300	



Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan			Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
		2	3	4	5	6	7		
1									
2.16.01.2.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peningkatan Pemeliharaan Barang milik daerah agar dalam kondisi baik	Dinas Komunikasi dan Informatika	31 Unit	535,481,186	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemeliharaan Barang milik daerah agar dalam kondisi baik	31 Unit	957,899,200
2.16.01.2.01.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perincian Kandaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya	Dinas Komunikasi dan Informatika	5 Unit	315,571,186	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kegiatan Rutin Dinas	4 Unit	205,696,200
2.16.01.2.01.06	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Komunikasi dan Informatika	14 unit	10,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika	25 unit	28,200,000
2.16.01.2.01.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	2 unit	210,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Komunikasi dan Informatika	2 unit	720,000,000
2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase peningkatan Desimulasi Informasi dan Komunikasi Publik	Kabupaten Lima Puluh Kota	55%	1,735,997,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten	55%	2,452,250,000
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	35%	1,735,997,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan pengelolaan komunikasi dan informasi publik	55%	2,452,250,000
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Lima Puluh Kota	12 dokumen	598,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tertaskannya Pengelolaan Media Komunikasi Publik milik Pemerintah	12 dokumen	1,357,250,000
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten Lima Puluh Kota	32 dokumen	136,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sebagai wujud dan keterbukaan informasi Publik sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008, serta meningkatkan pemahaman CPO sebagai PPID Pembantu dalam menyediakan CDDP sebagai wujud pelayanan informasi publik kepada masyarakat luas dalam mengakses informasi	32 dokumen	276,000,000



Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan			Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		3	4	5	6	7	10					
1												
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Kabupaten Lima Puluh Kota.	3 layanan	1.089.166.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kegiatan untuk melaksanakan Upacara Hari Kebangkitan Nasional (Harkibnas)	3 layanan	500.000.000			
2.16.02.2.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Kabupaten Lima Puluh Kota.	24 dokumen	112.400.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	pola disseminasi informasi dalam masa krisis	24 dokumen	520.000.000			
02.16.03.	Program Aplikasi Informatika	Peningkatan pelayanan informasi dan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Kabupaten Lima Puluh Kota.	87%	3.602.212.808	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Lima Puluh Kota	89%	8.069.664.416			
02.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah di Lingshap Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.	Peningkatan Nama Domain yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah di Lingshap Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.	Kabupaten Lima Puluh Kota.	87%	2.427.888.060	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan pengelolaan nama domain, sub domain yang telah ditetapkan pemerintah pusat.	70%	8.060.809.216			
02.16.03.2.01.03	Penatausahaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	5 dokumen	77.512.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengelolaan domain dan subdomain reami Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Perbup pengelolaan Domain No. 4 Tahun 2017	5 dokumen	130.000.000			
02.16.03.2.01.03	Pengembangan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	Jumlah sistem jaringan intra pemerintahan daerah	Kab. Lima Puluh Kota	60 unit	2.350.187.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai daerah yang sedang berkembang dan memerlukan pembangunan di segala lini berusaha mewujudkan Smart City, dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sehingga membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik ke dibutuhkan fondasi berupa Jaringan Intra pemerintah dan Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Limapuluh Kota ke Artar OPD Kecamatan, Puskesmas dan Negeri	70 unit	6.730.009.216			



Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
02.16.03.2.02	Penjedaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Pencapaian e-Government di Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Kabupaten Lima Puluh Kota	67%	1.174.513,898	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	B	9	1.299.986,200
02.16.03.2.02.01	Peningkatan dan Pengembangan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Pencapaian e-Government di Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Kabupaten Lima Puluh Kota	12 Dokumen	180.368,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peringkasan e-Government perlu terus dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang Smart/ Smart Government	70%	180.000,000
02.16.03.2.02.02	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data pemerintah yang dikelola	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 unit	325.369,432	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Politisasi pelatihan untuk admin web seluruh OPD sesuai tupakal yang ditetapkan pada SK Penetapan Pengelolaan Portal yang ditetapkan Bupati	1 Kali Pelatihan	224.088,200
2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kabupaten Lima Puluh Kota	43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	147.212,808	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membantu pelayanan di bidang data untuk masyarakat dengan adanya sistem 1 data kabupaten Lima Puluh Kota	43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	185.000,000
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kabupaten Lima Puluh Kota	5 unit	223.523,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengembangan SIM TK di setiap OPD dilakukan dengan cara antara lain: Melakukan jaring pendataan formak, Bimbingan Teknis, dan Pelatihan dan pelatihan teknis sesuai Perbas 47 Tahun 2018	3 unit	170.000,000
02.16.03.2.02.08	Pengembangan Sistem Penghubung Layanan	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	2 layanan	102.070,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Organisasi perangkat daerah dalam pengembangan Sistem Informasi harus melakukan integrasi dengan sistem informasi yang sudah ada atau di kembangkan dengan mengacu pada Cerak Biru Masing-masing sistem informasi sesuai Perbas 47 Tahun 2018, BAB IX Pasal 15	7 layanan	80.000,000
02.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Dimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Dokumen	151.350,068	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kegiatan ini merupakan persiapan untuk menciptakan 100 Smart City Program Kementerian Kominfo Tahun 2020	1 Dokumen	450.000,000

Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Sumber Dana	Catatan Penting	Pra-ran Maju Rencana Tahun 2024 Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Pemanfaatan data/informasi Statistik Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	83%	405,762,424	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prioritas Pembangunan (RP-PM) ta 6 dan 7 PM Kominfo No. 22 tahun 2019 tentang Rencana Kementerian Kominfo Republik Indonesia 2015-2019 dan agenda pembangunan nasional (kegiatan Pendukung E-Government)		627,300,000	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	83%	465,762,424	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya kualitas dan mutu penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah.	85%	627,300,000	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kabupaten Lima Puluh Kota	10 dokumen	85,194,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perluanya ketersediaan data dan informasi dalam bentuk satu naskah buku KIA sebagai salah satu rujukan data dan informasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah untuk tata ruang daerah.	10 dokumen	170,000,000	
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitas dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kabupaten Lima Puluh Kota	4 orang	59,627,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perluanya Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintahan yang mampu menyajikan dan menyajikan agar meningkat mutu Statistik daerah yang terintegrasi	4 orang	75,000,000	
2.20.02.2.01.03	Meningkatkan Mutu Data Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Kabupaten Lima Puluh Kota	10 dokumen	70,706,708	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perluanya buku Meta data Statistik sektoral sebagai salah satu rujukan data dan informasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah untuk tata ruang daerah.	10 dokumen	110,000,000	
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kalaupun Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dan BPS	Kabupaten Lima Puluh Kota	42 Orang	73,056,505	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perluanya buku Meta data Statistik sektoral sebagai salah satu rujukan data dan informasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah untuk tata ruang daerah.	42 Orang	115,000,000	



Kode	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Target-Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikat	Sumber Dana	Pelembagaan Madya Rencana Tahun 2023
			Lokasi	Target-Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikat					
1			4	5	6	8	9	10		
2.20.02.2.01.06	Penyenggaraan Operasi Statistik Sektor di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektor yang Dihimpun	Kabupaten Lima Puluh Kota.	4 dokumen	107.155,608	Perlu ada ketersediaan data dan informasi sebagai salah satu rujukan data dan informasi khususnya perencanaan pembangunan daerah	4 dokumen	157.300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2.21.02.	Program Penyelenggaraan Penerimaan dan Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota.	55,83%	1.673.974,200	Tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah pada sistem elektronik baik pada portal maupun pada aplikasi - aplikasi E-Government lainnya	41,88%	883.000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2.21.02.2.01.	Penyelenggaraan Penerimaan dan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Penerimaan dan pengamanan informasi pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Kabupaten Lima Puluh Kota.	36,83%	1.543.299,200	Terangnya keamanan sistem pada sistem elektronik pada baik pada portal maupun pada aplikasi -aplikasi E-Government lainnya.	41,88%	883.000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2.21.02.2.01.01	Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi Sani Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sani Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kabupaten Lima Puluh Kota.	2 dokumen	33.855,000	Konsep penyelenggaraan urusan persandian perlu di sunatkan ke tingkat pemerintah kabupaten, sehingga seiring peningkatan aktifitas penyelenggaraan urusan persandian di Kabupaten Lima Puluh Kota akan dapat teralisasi	2 dokumen	60.000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis kebutuhan dan penyediaan sumberdaya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pergerakan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota.	1 Laporan	54.890,000	Dengan peningkatan aktifitas penyelenggaraan urusan persandian, maka sudah perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, agar pelaksanaan kegiatan selanjutnya lebih	1 Laporan	48.000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota berbasis elektronik dan Non elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten Lima Puluh Kota.	4 Laporan	262.853,500	Informasi telah menjadi komoditas dalam kehidupan masyarakat Masyarakat luas menghendaki suatu Keterbukaan Informasi dalam penyelenggaraan negara. Di sisi lain, terdapat informasi yang harus dibatasi dari akses masyarakat, terutama yang mengandung akibat pada	4 Laporan	250.000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kabupaten Lima Puluh Kota.	43 Perangkat Daerah	1.170.650,700	Terlayanya keamanan sistem pada sistem elektronik pada baik pada portal maupun pada aplikasi -aplikasi E-Government lainnya	100 orang	300.000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Kode	Program/ Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan				Rencana tahun 2023				Pembinaan Mula, Koncama, Tahun 2023	
		1	2	3	4	Lokasi	TARGET CEPATAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Peringkat
2.21.02.2.02	Pemetaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota			Peningkatan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	43 Perangkat Daerah	131,675,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	43 Perangkat Daerah	8	185,000,000
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	Kabupaten Lima Puluh Kota	43 Perangkat Daerah	131,675,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	43 Perangkat Daerah	8	185,000,000
							13,726,618,432				20,859,745,681

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Kualitas Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Cetakan Peningkat	Target Capaian Kinerja	
						Program	Kualitas Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tokoh Ukur
<p>URUSAN PEMERINTAHAN WILAYAH YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</p> <p>URUSAN PEMERINTAHAN BERANGKUTAN DAN INFORMATIKA</p> <p>PROGRAM PUMUNGSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA</p>												
2	Administratif Keuangan Perangkat Daerah							11,646,281,800			33,901,727,293	
2 16								6,368,072,000			38,218,001,228	
2 16 01								3,468,300,000			4,337,780,152	
2 16 01 2 02												
2 16 01 2 02 01	Persiapan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketercapaian Penyalang Urusan Pemerintahan Daerah	Amtah Orang yang Monev/inspeksi dan Tunjangan ASN	Perentase Bertp Administrasi Keuangan	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	35 %	42 Orang/daerah %	3,569,238,694	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perentase Ketercapaian Penyalang Urusan Pemerintahan Daerah	35 %	4,331,248,000
2 16 01 2 02 05	Koordinasi dan Pengawasan Laporan Keuangan Akrif Tahun SKPD	Persentase Ketercapaian Penyalang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhr tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan Laporan Keuangan Akhr Tahun SKPD	Persentase Bertp Administrasi Keuangan	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	35 %	1 Laporan	9,052,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perentase Ketercapaian Penyalang Urusan Pemerintahan Daerah	35 %	6,511,252
2 16 01 2 05	Administratif Kepegawaian Perangkat Daerah							88,480,000			437,102,580	
2 16 01 2 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Seragam Akrif Kelembagawannya	Persentase Ketercapaian Penyalang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Seragam Akrif Kelembagawannya	Persentase Tingkat Cakupan Pegawai	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	35 %	3 Paket	88,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perentase Ketercapaian Penyalang Urusan Pemerintahan Daerah	35 %	140,662,500
2 16 01 2 06	Administratif Urusan Perangkat Daerah							682,485,000			566,433,083	
2 16 01 2 06 01	Penyusunan Komponen Instalasi Kerja/Pengorganisasian Bangunan Kantor	Persentase Ketercapaian Penyalang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Kerja/Pengorganisasian Bangunan Kantor yang Diadibakan	Persentase Meningkatkan Penyelenggaraan Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	35 %	1 Paket	15,245,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketercapaian Penyalang Urusan Pemerintahan Daerah	35 %	5,640,300
2 16 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	Persentase Ketercapaian Penyalang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Peralengkapan Kantor yang Diadibakan	Persentase Meningkatkan Penyelenggaraan Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	35 %	3 Paket	102,661,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketercapaian Penyalang Urusan Pemerintahan Daerah	35 %	111,134,300
2 16 01 2 06 03	Persentase Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketercapaian Penyalang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Diadibakan	Persentase Meningkatkan Penyelenggaraan Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	35 %	2 Paket	38,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketercapaian Penyalang Urusan Pemerintahan Daerah	35 %	3,993,000
2 16 01 2 06 04	Persentase Peralatan Logistik Kantor yang Diadibakan	Persentase Ketercapaian Penyalang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan Logistik Kantor yang Diadibakan	Persentase Meningkatkan Penyelenggaraan Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	35 %	2 Paket	62,761,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketercapaian Penyalang Urusan Pemerintahan Daerah	35 %	95,661,400

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.03.2.01.10.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.03.2.01.10.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Uraian/ Bidang/ Unsur/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Bencana Tahun 2023				Pembinaan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Efektifitas Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Jumlah Output Kegiatan	Progres	Kualitas Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Page Indikasi (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Cerdas Pening
											Tidak Ujar	Target	
2.16.03.2.01.02	Penyediaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan layanan informasi dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK)	Jumlah Dukumen Penetapan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Kementerian Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Sema, Kecamatan, Semau, Kabupaten	87 %	5 Dokumen	87 %	77.512.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan layanan informasi dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK)	87 %	130.000.000
2.16.03.2.01.03	Pengembangan Sistem Layanan Info Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan layanan informasi dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK)	Hambatan Sistem layanan info Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subditaman di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Sema, Kecamatan, Semau, Kabupaten	87 %	80 Unit	87 %	2.350.107.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan layanan informasi dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK)	87 %	6.730.505.216
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan layanan informasi dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK)	Jumlah Dukumen Hasil Penyelenggaraan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subditaman di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Sema, Kecamatan, Semau, Kabupaten	87 %	12 Dokumen	87 %	190.556.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan layanan informasi dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK)	87 %	1.200.000.000
2.16.03.2.02.01	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan layanan informasi dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK)	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Penetapan Daerah yang Ditetapkan	Persentase peningkatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subditaman di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Sema, Kecamatan, Semau, Kabupaten	87 %	1 Unit	87 %	368.899.432	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan layanan informasi dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK)	87 %	224.005.200
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase peningkatan layanan informasi dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK)	Jumlah Prinsipal Daerah yang Menerima Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase peningkatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subditaman di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Sema, Kecamatan, Semau, Kabupaten	87 %	43 Perangkat Daerah	87 %	147.212.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan layanan informasi dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK)	87 %	181.000.000
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase peningkatan layanan informasi dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK)	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Ditembangkan	Persentase peningkatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subditaman di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Sema, Kecamatan, Semau, Kabupaten	87 %	5 Unit	87 %	333.023.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan layanan informasi dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK)	87 %	115.000.000
2.16.03.2.02.08	Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase peningkatan layanan informasi dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK)	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subditaman di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Sema, Kecamatan, Semau, Kabupaten	87 %	2 Layanan	87 %	102.070.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan layanan informasi dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK)	87 %	60.000.000

**Program dan Kegiatan Pemngkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023**

Kode	Uraian/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023				Pembinaan Mengu Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Kualitas Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Cakupan Penting	Target Capaian Kinerja		
						Program	Kualitas Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tabel (Klar)	Target	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													627.300.000	
PROGRAM PENYELANGKARAN STATISTIK SEKTORAL													627.300.000	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingshap Daerah Kabupaten/Kota													627.300.000	
2.16.03.2.03.09	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kompetensi/Keahlian Kecerdasan Kota Cerdas	Perentase peningkatan layanan informasi dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi komunikasi (IK)	Artinya Dokumen Program seksi yang Dimplementasikan sesuai dengan Matriksplan Sman City	Perentase Peningkatan Pelayanan e-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kecurahan	87 %	1 Dokumen	67 %	151.350.068	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		87 %	Perentase peningkatan layanan informasi dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi komunikasi (IK)	650.000.000
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Perentase Peningkatan data/informasi/ Statistik Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Perentase Peningkatan Penyenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kecurahan	83 %	10 Dokumen	83 %	55.194.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		83 %	Perentase Peningkatan data/ Informasi/ Statistik Daerah	170.000.000
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengumpulan Mula Statistik Daerah yang Terintegrasi	Perentase Peningkatan data/ Informasi/ Statistik Daerah	Jumlah SIM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengumpulan Mula Statistik Daerah yang Terintegrasi	Perentase Peningkatan Penyenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kecurahan	83 %	4 Orang	83 %	50.607.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		83 %	Perentase Peningkatan data/ Informasi/ Statistik Daerah	75.000.000
2.20.02.2.01.03	Membangun Monev/BB Statistik Sektoral	Perentase Peningkatan data/ Informasi/ Statistik Daerah	Jumlah Laporan Statistik Sektoral yang Dihimpun	Perentase Peningkatan Penyenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kecurahan	83 %	10 Laporan	83 %	70.706.768	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		83 %	Perentase Peningkatan data/ Informasi/ Statistik Daerah	110.000.000
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kolektoran Statistik Sektoral	Perentase Peningkatan data/ Informasi/ Statistik Daerah	Jumlah Kegiatan Desa yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Perentase Peningkatan Penyenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kecurahan	83 %	40 Orang	83 %	73.098.508	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		83 %	Perentase Peningkatan data/ Informasi/ Statistik Daerah	110.000.000
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Operasi Statistik Sektoral di Daerah	Perentase Peningkatan data/ Informasi/ Statistik Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Perentase Peningkatan Penyenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kecurahan	83 %	4 Dokumen	83 %	107.155.808	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		83 %	Perentase Peningkatan data/ Informasi/ Statistik Daerah	157.300.000
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAAN													883.000.000
2.21.02	PROGRAM PENYELANGKARAN PERSANDIAAN UNTUK PENGAMBIAN INFORMASI													883.000.000
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Perantara untuk Pengumpulan Informasi Statistik Daerah Kabupaten/Kota	Perentase Peningkatan data/ Informasi/ Statistik Daerah	Jumlah Kegiatan Desa Kedua Gunung Informasi dan Lings Komunitas Sendi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Dihimpun	Perentase Peningkatan Penyenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kecurahan	83,33 %	2 Dokumen	80,00 %	33.855.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		83,33 %	Tingkat Keamiran Informasi Pemerintah Daerah	60.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika ini disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika 2021-2026, terutama pada target-target yang terdapat pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika 2021-2026 dan isu-isu strategis yang masih relevan dengan kondisi lima tahun mendatang.

Rencana Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas

No	Sasaran	Indikator	Target Perangkat Daerah/RPJMD (Tahun)		Ket
			2023	2024	
1	Meningkatkan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	Indek keterbukaan Informasi Publik	79	80	IKU Kepala Dinas/IKD
2	Mengembangkan dan Memanfaatkan Sistem Informasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan (e-Government)	Nilai Indek SPBE Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	3,18	3,40	IKU Kepala Dinas/IKD
3	Mengembangkan dan Memanfaatkan Penyusunan dan pengumpulan data Statistik daerah.	Persentase OPD yang menggunakan Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	55	65	IKU Kepala Dinas/IKD
4	Meningkatkan Penyelenggaraan Persandian	Tingkat keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten	35,83	41,88	IKU Kepala Dinas/IKD



Tabel
Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan 2023

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indikator	Target		Ket
			2022	2023	
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan.	16	18	Jumlah
	2	Indek keterbukaan Informasi Publik	78	79	Indek
	3	Nilai indek SPBE Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	3,00	3,18	Indek
	4	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	80	85	%
II	STATISTIK				
	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	50	55	%
	2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	50	55	%
III	PERSANDIAN				
	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	29,85	35,83	%

TABEL
RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN BERDASARKAN URUSAN, JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kode	Bidang Urusan	Rencana Awal RKPD 2023		Tahun 2024	Rencana Awal RKPD 2023		Tahun 2024	Ket
		Program	Kegiatan		Jumlah	Total Pagu (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		13.604.782.516			13.604.782.516		
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	11.646.281.808	19.429.445.651	9	11.646.281.808	19.429.445.651	
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	405.762.424	627.300.000	1	405.762.424	627.300.000	
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1.673.974.200	883.000.000	2	1.673.974.200	883.000.000	
	JUMLAH		13.604.782.516	20.939.745.651		13.604.782.516	20.939.745.651	



BAB V PENUTUP

Terkait dengan penyiapan dan penyediaan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat OPD, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika (Renstra Diskominfo) Tahun 2022-2026 yang memuat Visi, Misi, Kebijakan dan Program Pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kedua dokumen perencanaan di atas maka seluruh OPD perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) masing-masing. Sehubungan dengan ini maka Dinas Komunikasi dan Informatika juga menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Renja Diskominfo) tahun 2023. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2023, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2023 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lima Puluh Kota


Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si
Nip: 196608281998031002



Rencana Kerja (Renja)
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 391 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 71) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tugas secara umum :
 - a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023;
 - b. Melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah seperti Forum Perangkat Daerah, dan rapat-rapat lainnya.
 - c. Menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja), mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Renja, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
 - a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - c. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d. Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - e. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - f. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan

pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.

KELIMA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan 2022 melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 6 Desember 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 391 TAHUN 2021

TANGGAL : 06 Desember 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	SEKRETARIAT DAERAH	
	Sekretaris Daerah	Ketua
	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Wakil Ketua II
	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
	Kabag Perencanaan Dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Pemerintahan	Anggota
	Kabag Hukum	Anggota
	Kabag Organisasi	Anggota
	Kabag Administrasi Pembangunan	Anggota
	Kabag Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kabag Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Anggota
	Kabag Kesejahteraan Rakyat	Anggota
	Kabag Umum	Anggota
	Kabag Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Pelaporan	Anggota
	Kasubag Protokol	Anggota
	Kasubag Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Kasubag Dokumentasi Pimpinan	Anggota
	Kasubag Kelembagaan Dan Anjab	Anggota
	Kasubag Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Anggota
	Kasubag Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	Anggota
	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perlengkapan	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota
	Kasubag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Anggota
	Kasubag Pimpinan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota
	Kasubag Penyusunan Program	Anggota
	Kasubag Pengendalian Program	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Evaluasi Dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Pembinaan BUMD Dan BLUD	Anggota
	Kasubag Perekonomian	Anggota
	Kasubag Sumber Daya Alam	Anggota
	Kasubag Peraturan Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Bantuan Hukum	Anggota
	Kasubag Dokumentasi Dan Informasi	Anggota
	Kasubag Bina Mental Dan Spiritual	Anggota
	Kasubag Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasubag Kesejahteraan Masyarakat	Anggota
	Kasubag Administrasi Pemerintahan Dan Kewilayahan	Anggota
	Kasubag Otonomi Daerah	Anggota
	Kasubag Kerjasama Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Daerah	Anggota
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Sekretaris DPRD	Ketua
	Kabag Umum dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Penganggaran	Anggota
	Kasubag Program dan Keuangan	Anggota
	Kasubag Kajian Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Humas, Protokol, dan Publikasi	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Pengawasan	Anggota
	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Persidangan dan Risalah	Anggota
	Kasubag Kerjasama dan Aspirasi	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
3.	INSPEKTORAT	
	Inspektur	Ketua
	Sekretariat	Sekretaris
	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
	Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Analisi Dan Evaluasi	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Administrasi Umum Dan Keuanagn	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat	Anggota
	Pelaksana pada Inspektorat	Anggota
4.	DINAS KESEHATAN	
	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Kesehatan	Anggota
	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Anggota
	Kabid Kesehatan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Evaluasi, Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Aset	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Alat Kesehatan dan Fasyankes	Anggota
	Kasi Pelayanan Kefarmasian dan Perizinan	Anggota
	Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
	Kasi Surveilens, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan	Anggota
	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Nafza	Anggota
	Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Anggota
	Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Anggota
	Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Haji, dan Jaminan Kesehatan	Anggota
	Kasi Peningkatan Mutu dan Akreditasi, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kesehatan	Anggota
5.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Anggota
	Kabid Kebudayaan	Anggota
	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan BMD	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Kurikulum dan Penilaian	Anggota
	Kasi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasana	Anggota
	Kasi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Anggota
	Kasi Pendidikan Non Formal	Anggota
	Kasi PTK PAUD dan PNF	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP	Anggota
	Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
	Kasi Sejarah dan Nilai Tradisi	Anggota
	Kasi Kesenian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Anggota
	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Pelaksanaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga	Anggota
	Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Preservasi Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Perencanaan Jasa Konstruksi	Anggota
	Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan	Anggota
	Kasi Pemantauan Dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Tata Ruang	Anggota
	Kasi Pemanfaatan dan pengendalian	Anggota
	Kasi Pertanahan	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya	Anggota
	Kasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Anggota
	Kasi Tata Bangunan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	Kepala Satpol PP	Ketua
	Sekretaris Satpol PP	Sekretaris
	Kabid Trantib	Anggota
	Kabid Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kabid PPUUD	Anggota
	Kabid SDA	Anggota
	Kasubag Program & Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Intelijen	Anggota
	Kasi Trantib & Pengamanan	Anggota
	Kasi Operasional & Logistik	Anggota
	Kasi Bina Potensi	Anggota
	Kasi Data Informasi	Anggota
	Kasi Satlinmas dan Pengaduan Masyarakat	Anggota
	Kasi Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kasi Penegakan	Anggota
	Kasi Pembinaan Pengawasan & Penyuluhan	Anggota
	Kasi Pelatihan Dasar	Anggota
	Kasi Teknis Fungsional	Anggota
	Kasi Tindak Internal	Anggota
	Pelaksana pada Satpol PP	Anggota
8.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	Ketua
	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran	Sekretaris
	Kabid Pencegahan	Anggota
	Kabid Pemadam Dan Penyelamatan	Anggota
	Kabid Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan	Anggota
	Kasi Pencegahan Dan Inspeksi	Anggota
	Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Dunia Usaha	Anggota
	Kasi Pengendalian Operasi Dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Pemadam Dan Investigasi	Anggota
	Kasi Penyelamatan Dan Evakuasi	Anggota
	Kasi Pengadaan Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasi Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana	Anggota
	Kasi Informasi Dan Pengelolaan Data	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
9.	DINAS SOSIAL	
	Kepala Dinas Sosial	Ketua
	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris
	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota
	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Nafza dan Korban Perdagangan Orang	Anggota
	Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana	Anggota
	Kasi Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar	Anggota
	Kasi Jaminan Sosial Keluarga	Anggota
	Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Identitas Penduduk	Anggota
	Kasi Pindah Datang Penduduk	Anggota
	Kasi Pendataan Penduduk	Anggota
	Kasi Kelahiran	Anggota
	Kasi Perkawinan dan Perceraian	Anggota
	Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data	Anggota
	Kasi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Kerjasama	Anggota
	Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Inovasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Kepala DPPKBPPPA	Ketua
	Sekretaris DPPKBPPPA	Sekretaris
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk	Anggota
	Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
	Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan	Anggota
	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak	Anggota
	Pelaksana pada DPPKBPPPA	Anggota
12.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Kepala DPMPTSP	Ketua
	Sekretaris DPMPTSP	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Terpadu	Anggota
	Kabid Promosi	Anggota
	Kabid Perencanaan dan Pengembangan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya	Anggota
	Kasi Promosi	Anggota
	Kasi Sarana dan Prasarana Promosi	Anggota
	Kasi Data dan Informasi	Anggota
	Kasi Perencanaan Potensi dan Peluang Investasi	Anggota
	Kasi Penyuluhan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Regulasi Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pemantauan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pembinaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pengawasan Penanaman Modal	Anggota
	Pelaksana pada DPMPTSP	Anggota
13.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	
	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Ketua
	Sekretaris Perdagangan, Koperasi UKM	Sekretaris
	Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kelembagaan & Pengawasan Koperasi	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi & Usaha Mikro	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan perizinan	Anggota
	Kasi Peningkatan kualitas SDM koperasi & kewirausahaan	Anggota
	Kasi Metrologi	Anggota
	Kasi Pengembangan Jaringan Perdagangan	Anggota
	Kasi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	Anggota
	Kasi Sarana Distribusi dan Stabilitas Barang Pokok dan Penting	Anggota
	Kasi Pengawasan Perizinan dan Pendaftaran	Anggota
	Kasi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Anggota
	Kasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan	Anggota
	Kasi Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kesehatan Koperasi	
	Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Anggota
	Kasi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Anggota
14.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Ketua
	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri	Anggota
	Kabid Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
	Kabid Ketenagakerjaan	Anggota
	Kabid Transmigrasi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pembinaan Industri Agro	Anggota
	Kasi Pembinaan Industri Non Agro	Anggota
	Kasi Pengawasan, Sertifikasi dan Standarisasi Industri	Anggota
	Kasi Perizinan dan Data	Anggota
	Kasi Pengembangan teknologi Industri	Anggota
	Kasi Promosi dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
	Kasi Perlindungan Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
15.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Kepala Diskominfo	Ketua
	Sekretaris Diskominfo	Sekretaris
	Kabid Komunikasi Publik	Anggota
	Kabid Aplikasi Informatika	Anggota
	Kabid Statistik dan Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Kabid Persandian Dan Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	Anggota
	Kasi Pengelola Media Komunikasi Publik	Anggota
	Kasi Layanan Hubungan Media Dan Kehumasan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Anggota
	Kasi Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Aplikasi	Anggota
	Kasi Statistik Sektor Ekonomi Dan Infastruktur	Anggota
	Kasi Statistik Sektor Pemerintahan Dan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Kasi Identifikasi Deteksi Dan Proteksi Keamanan SIBER	Anggota
	Kasi Penanggulangan Pemulihan Pemantauan Dan Pengendalian	Anggota
	Kasi Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Pelaksana pada Diskominfo	Anggota
16.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Ketua
	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kabid Pariwisata	Anggota
	Kasi Promosi dan Informasi	Anggota
	Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Anggota
	Kasi Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kabid Pemuda	Anggota
	Kasi Peningkatan Kreatifitas Kewirausahaan Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Kompetensi Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Anggota
	Kabid Olahraga	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Pendidikan	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Prestasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Rekreasi dan Tradisi	Anggota
	Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pariwisata	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pemuda Olah Raga	Anggota
	Kasi Pendataan dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota
17.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
	Kepala DPMD/N	Ketua
	Sekretaris DPMD/N	Sekretaris
	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kabid Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kawasan Nagari, SDA dan TTG	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Administrasi Produk Hukum Nagari dan Kerjasama antar Nagari	Anggota
	Kasi Organisasi Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Perencanaan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Aset dan Kekayaan Nagari	Anggota
	Pelaksana pada DPMD/N	Anggota
18.	DINAS PERHUBUNGAN	
	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris
	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Lalu Lintas	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana	Anggota
	Kasi Pengujian Sarana	Anggota
	Kasi Angkutan	Anggota
	Kasi Pengoperasian Prasarana	Anggota
	Kasi Perawatan Prasarana	Anggota
	Kasi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Anggota
	Kasi Lingkungan Perhubungan	Anggota
	Kasi Keselamatan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
19.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN	
	Kepala DLHPP	Ketua
	Sekretaris DLHPP	Sekretaris
	Kabid Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kapasitas Lingkungan Hidup	
	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Operasional Penanganan Sampah	Anggota
	Kasi Pengelolaan Limbah dan Sampah	Anggota
	Kasi Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Anggota
	Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Anggota
	Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Perumahan	Anggota
	Kasi Kawasan Permukiman	Anggota
	Kasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Anggota
	Analisis Lingkungan Hidup	Anggota
	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	Anggota
	Pelaksana pada DLHPP	Anggota
20.	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	Kepala Distanhorbun	Ketua
	Sekretaris Distanhorbun	Sekretaris
	Kabid Sarana	Anggota
	Kabid Prasarana	Anggota
	Kabid Perlindungan Tanaman Dan Perizinan Usaha	Anggota
	Kabid penyuluhan	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Evaluasi	Anggota
	Kasubag Keuangan Dan Aset	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pupuk Dan Pestisida	Anggota
	Kasi Sumber Daya Genetik	Anggota
	Kasi Alat Dan Mesin Pertanian	Anggota
	Kasi Pengembangan Prasarana	Anggota
	Kasi Irigasi	Anggota
	Kasi Infrastruktur Pertanian	Anggota
	Kasi Perlindungan Tanaman	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Penanganan Dampak Perubahan Iklim Dan Bencana Alam	Anggota
	Kasi Perizinan Dan Pembinaan Usaha	Anggota
	Kasi Kelembagaan	Anggota
	Kasi Ketenagaan	Anggota
	Kasi Penyelenggaraan Penyuluhan	Anggota
	Pelaksana pada Distanhorbun	Anggota
21.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
	Kabid Perbibitan dan Produksi	Anggota
	Kabid Keswan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kabid. Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kabid Penyuluhan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Kasi Non Ruminansia	Anggota
	Kasi Kasi Ruminansia	Anggota
	Kasi Perbibitan	Anggota
	Kasi Kesmavet	Anggota
	Kasi Kesehatan Hewan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pakan	Anggota
	Kasi Pembiayaan dan Investasi	Anggota
	Kasi Lahan dan Irigasi	Anggota
	Kasi Kelembagaan	Anggota
	Kasi Metode dan Infomasi	Anggota
	Kasi Ketenagaan	Anggota
	Pelaksana pada Disnakkeswan	Anggota
22.	DINAS PERIKANAN	
	Kepala Dinas Perikanan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perikanan	Sekretaris
	Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutiah	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Anggota
	Kasi Pengendalian Mutu Pembudiyaaan Ikan	Anggota
	Kasi Sarana dan Prasarana Perikanan	Anggota
	Kasi Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perikanan	Anggota
23.	DINAS PANGAN	
	Kepala Dinas Pangan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pangan	Sekretaris
	Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
	Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Ketersediaan Pangan	Anggota
	Kasi Distribusi dan Harga Pangan	Anggota
	Kasi Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Anggota
	Kasi Pengembangan Pangan Lokal	Anggota
	Kasi Keamanan Pangan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pangan	Anggota
24.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
	Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Promosi dan Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan TIK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Arsip Statis dan Layanan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Fungsional Pustakawan	Anggota
	Fungsional Kearsipan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan	Anggota
25.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	Kepala Bapelitbang	Ketua
	Sekretaris Bapelitbang	Sekretaris
	Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan	Anggota
	Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi Bapelitbang	Anggota
	Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Program Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Keuangan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pertanian dan Perikanan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Perindustrian, Perdagangan, UMK, Penanaman Modal dan Pariwisata Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sosial Budaya Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sumber Daya Manusia Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Infrastruktur Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengembangan Wilayah Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Data dan Informasi Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang	Anggota
	Pelaksana pada Bapelitbang	Anggota
26.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
	Kepala BKPSDM	Ketua

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Sekretaris BKPSDM	Sekretaris
	Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN	Anggota
	Kasubid Kepangkatan	Anggota
	Kasubid Mutasi	Anggota
	Kasubid Displin ASN	Anggota
	Kabid Informasi Pengadaan dan Status PNS	Anggota
	Kasubid Status ASN	Anggota
	Kasubid Informasi ASN	Anggota
	Kasubid Formasi dan Pengadaan ASN	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota
27.	BADAN KEUANGAN	
	Kepala Badan Keuangan	Ketua
	Sekretaris Badan Keuangan	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kabid Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Evaluasi Pendapatan Daerah	
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Badan Keuangan	Anggota
28.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Ketua
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris
	Kabid Ideologi Dan Wasbang	Anggota
	Kabid Politik Dalam Negeri	Anggota
	Kabid Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubid Bina Ideologi	Anggota
	Kasubid Bina Wasbang	Anggota
	Kasubid Bintah, Eksosbud Dan Agama	Anggota
	Kasubid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini	Anggota
	Kasubid HAL Dan Fasilitasi Pemilu	Anggota
	Kasubid Fasilitasi Parpol Dan Ormas	Anggota
	Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota
29.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
	Sekretaris BPBD	Sekretaris
	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pencegahan	Anggota
	Kasi Kesiapsiagaan	Anggota
	Kasi Kedaruratan	Anggota
	Kasi Logistik	Anggota
	Kasi Rehabilitasi	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Rekonstruksi	Anggota
	Pelaksana pada BPBD	Anggota
30.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS	
	Direktur RSUD dr. Achmad Darwis	Ketua
	Kabag Tata Usaha	Sekretaris
	Kabid Perencanaan Pelaporan Sarana Prasarana dan Logistik	Anggota
	Kabid Pelayanan Penunjang dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Dan Logistik	Anggota
	Kasi Perencanaan Dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang Non Medis Dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Kasi Pelayanan Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Perawatan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Humas	Anggota
	Kasubag Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada RSUD Achmad Darwis	Anggota
31.	KECAMATAN GUGUAK	
	Camat Guguak	Ketua
	Sekretaris Camat Guguak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Guguak	Anggota
32.	KECAMATAN PAYAKUMBUH	
	Camat Payakumbuh	Ketua
	Sekretaris Camat Payakumbuh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Payakumbuh	Anggota
33.	KECAMATAN MUNGKA	
	Camat Mungka	Ketua
	Sekretaris Camat Mungka	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Mungka	Anggota
34.	KECAMATAN SULIKI	
	Camat Suliki	Ketua
	Sekretaris Camat Suliki	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Suliki	Anggota
35.	KECAMATAN BUKIK BARISAN	
	Camat Bukik Barisan	Ketua
	Sekretaris Camat Bukik Barisan	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan	Anggota
36.	KECAMATAN GUNUANG OMEH	
	Camat Gunuang Omeh	Ketua
	Sekretaris Camat Gunuang Omeh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Gunuang Omeh	Anggota
37.	KECAMATAN LUAK	
	Camat Luak	Ketua
	Sekretaris Camat Luak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Luak	Anggota
38.	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
	Camat Lareh Sago Halaban	Ketua
	Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Lareh Sago Halaban	Anggota
39.	KECAMATAN HARAU	
	Camat Harau	Ketua
	Sekretaris Camat Harau	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Harau	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
40.	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
	Camat Situjuah Limo Nagari	Ketua
	Sekretaris Camat Situjuah Limo Nagari	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Anggota
41.	KECAMATAN AKABILURU	
	Camat Akabiluru	Ketua
	Sekretaris Camat Akabiluru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru	Anggota
42.	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
	Camat Pangkalan Koto Baru	Ketua
	Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Anggota
43.	KECAMATAN KAPUR IX	
	Camat Kapur IX	Ketua
	Sekretaris Camat Kapur IX	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 6 Desember 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

